

Ikhtisar

Global State of Democracy 2019

Mengatasi Persoalan, Memulihkan Janji



Edisi Bahasa Inggris:

2019 International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Terjemahan Bahasa Indonesia:

2020 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance

Publikasi International IDEA bebas dari kepentingan nasional atau politik tertentu. Pandangan-pandangan yang terungkap dalam publikasi ini tidak selalu mewakili pandangan International IDEA, Pengurus atau Anggota Dewanannya. Permohonan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan seluruh atau sebagian dari publikasi ini harus diajukan ke:

International IDEA

Strömsborg

SE-103 34 Stockholm

Swedia

Tel: +46 8 698 37 00

Email: info@idea.int

Website: <http://www.idea.int>

International IDEA mendukung penyebaran hasil kerjanya dan akan segera menjawab permintaan izin untuk mereproduksi atau menerjemahkan publikasi-publikasinya. Publikasi ini adalah terjemahan dari versi Bahasa Inggris International IDEA's "Summary: The Global State of Democracy 2019: Addressing the Ills, Reviving the Promise." Keakuratan naskah yang diterjemahkan belum diverifikasi oleh International IDEA. Dalam hal terjadi keraguan, yang berlaku adalah versi asli bahasa Inggris (ISBN: 978-91-7671-264-1). Penerjemahan ini dilakukan oleh Perludem.

Penerjemah: Catherine Natalia

Editing Naskah: Antony Lee

Ilustrasi Sampul: Phoenix Design Aid

Desain dan Layout: Eko Punto Pambudi (berdasarkan desain yang dikembangkan oleh Phoenix Design Aid)

Percetakan:

ISBN: 978-91-7671-302-0 (cetak)

ISBN: 978-91-7671-303-7 (PDF)

<https://doi.org/10.31752/idea.2020.10>



Ikhtisar

Global State of Democracy 2019

Mengatasi Persoalan, Memulihkan Janji



Daftar Isi

Pengantar	iii
Bab 1. Kerangka Kerja Konseptual	1
Bab 2. Temuan Utama Global	3
Tren Demokrasi yang Memberi Harapan: Kemajuan dan Peluang	3
Tren Demokrasi yang Mengkhawatirkan: Tantangan-tantangan	9
Bab 3. Temuan Utama Regional	23
Temuan Regional: Afrika	23
Temuan Regional: Timur Tengah	24
Temuan Regional: Amerika Latin dan Karibia	25
Temuan Regional: Amerika Utara	26
Temuan Regional: Asia dan Pasifik	27
Temuan Regional: Eropa	28
Bab 4. Pertimbangan Kebijakan	30
Referensi Pilihan	32

Pengantar

Demokrasi sedang menghadapi persoalan dan janji-janji yang mengikuti demokrasi perlu dipulihkan kembali.

Memang, nilai, kelayakan, dan masa depan demokrasi tengah menghadapi tantangan di masa ini, lebih dari pada era-era sebelumnya dalam sejarah modern, atau setidaknya sejak tahun 1930-an. Di saat empat dekade terakhir telah terlihat perluasan demokrasi yang luar biasa di seluruh wilayah dunia, tahun-tahun terakhir ini ditandai dengan menurunnya tatanan di negara demokrasi, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tatkala gagasan negara demokrasi terus memobilisasi rakyat di seluruh dunia, praktik di negara demokrasi telah menimbulkan kekecewaan dan menyentak pemahaman banyak warga negara dan pendukung demokrasi.

Erosi demokrasi sedang terjadi dalam situasi dan konteks yang berbeda. Negara-negara demokrasi baru seringkali lemah dan rentan. Pemerintahan dan perwakilan politik mereka menghadapi tantangan dalam membangun dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di tengah keterbatasan sumber daya. Negara-negara demokrasi yang lebih tua berjuang untuk memberi jaminan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan. Porsi negara demokrasi berkualitas tinggi menurun dan banyak dari negara-negara itu berhadapan dengan para penantang populis, yang menggabungkan eksklusif dan pengabaian prinsip-prinsip demokrasi.

Baik negara demokrasi tua maupun muda sedang menderita penyusutan ruang sipil, dengan penurunan kebebasan sipil, pengekanan terhadap masyarakat sipil, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Laporan ini berisi contoh negara-negara di mana pemerintahnya secara sengaja membatasi ruang sipil dan memperlemah pengawasan konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif, yang berakibat pada kemunduran demokrasi dan memburuknya supremasi hukum. Di beberapa negara, persoalan ini sudah begitu parah, sehingga mengakibatkan kerusakan demokrasi secara parsial (dengan contoh seperti Nikaragua dan Pakistan) ataupun kerusakan sepenuhnya (Venezuela).

Kemunduran demokrasi modern terjadi dari dalam sistem demokrasi itu sendiri: melalui reformasi legislatif dan konstitusi serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mayoritas yang terpilih secara demokratis. Ditinggalkannya secara bertahap pilar-pilar non-pemilu dalam negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi pada akhirnya merusak

prinsip utama demokrasi, yakni pengendalian oleh rakyat dan kesetaraan politik

Kemunduran demokrasi terjadi bersamaan dengan bangkitnya politisi dan gerakan populis yang membuat lebih banyak pemilih merasa tertarik, terutama di Eropa, begitu juga di Amerika serta Asia dan Pasifik. Kendati bentuknya berbeda sesuai dengan konteks budaya dan regional.

Bangkitnya politik populis tidak terlepas dari berbagai faktor yang konteksnya spesifik. Namun, secara umum beberapa pendorong kebangkitan politik populis itu juga termasuk kekecewaan terhadap aktor politik tradisional, ketidakmampuan sistem politik saat ini mengatasi masalah utama sosial dan ekonomi; dan kontradiksi antara apa yang diharapkan bisa diwujudkan oleh demokrasi dengan apa yang dihasilkan oleh demokrasi. Kaum Populis memanfaatkan ketidakpuasan warga negara karena meningkatnya ketidaksetaraan (yang dipersepsikan maupun aktual), korupsi, meningkatnya migrasi massal (sekali lagi, baik yang dipersepsikan maupun aktual), pengangguran dan prekariatisasi kerja (pekerjaan menjadi temporer), serta meningkatnya digitalisasi dan dampaknya pada struktur pasar ketenagakerjaan.

Ciri khas retorika dan praktik populis adalah tidak menghargai akuntabilitas lembaga yang mengecek pemerintahan; melindungi pluralisme politik; dan membentuk demokrasi. Kecenderungan yang inheren pada kekuasaan yang tidak terkendali menyebabkan populisme menjadi ancaman bagi demokrasi. Akan tetapi, beberapa kalangan juga berpendapat bahwa politisi populis membantu mendorong isu-isu penting masuk dalam agenda—seperti misalnya korupsi yang berlangsung dalam negara demokrasi—yang perlu ditangani oleh negara demokrasi agar ia bisa kembali mendapatkan legitimasinya.

Pada saat yang bersamaan, sejumlah negara dengan pengaruh politik dan ekonomi besar tampak kebal dari pengaruh demokrasi. Rezim politik ini tidak hanya bertahan sebagai negara non-demokrasi (misalnya China, Mesir, Arab Saudi) atau rezim hibrida (misalnya Singapura), tetapi juga mulai mengeksplor model tata kelola mereka ke negara lainnya.

Terlepas dari gambaran suram ini, juga masih terdapat alasan untuk optimistis. Transisi demokrasi terus terjadi dalam rezim politik yang tampaknya sangat tidak demokratis

atau terjebak di zona abu-abu, sistem hibrida antara negara demokrasi dan non-demokrasi. Contoh-contoh dari kasus tersebut meliputi Gambia pada tahun 2017, awal demokrasi yang menjanjikan di Ethiopia pada 2018, dan transisi menuju demokrasi pada tahun 2018 dari dua rezim hibrida yang bertahan paling lama di dunia: Armenia dan Malaysia.

Tuntutan rakyat untuk reformasi demokratik yang didukung oleh mobilisasi sosial yang intens bisa disaksikan di seluruh dunia, di tempat-tempat seperti Aljazair, Armenia, Hong Kong, Mesir, Rusia dan Sudan. Negara demokrasi baru seperti Timor-Leste dan Tunisia, serta negara demokrasi yang lebih mutakhir, seperti Gambia juga telah mengonsolidasikan beberapa capaian demokrasi mereka.

Salah satu temuan utama laporan ini ialah bahwa negara demokrasi tidak selalu menghasilkan hasil akhir yang berkelanjutan dan kesejahteraan seperti banyak diharapkan. Sejumlah pemerintahan yang terpilih secara demokratis telah gagal secara substansial untuk mengurangi korupsi, memajukan kesetaraan gender, mengurangi ketidaksetaraan sosial, politik dan ekonomi, atau menghasilkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, data indeks Global State of Democracy (Indeks GSoD) menunjukkan bahwa sebagian besar negara demokrasi hibrida yang tergotha dengan otoritarianisme dan negara non-demokrasi, pada umumnya tidak menghasilkan dan mempertahankan kebijakan dengan hasil akhir yang lebih baik, dengan beberapa pengecualian. Data menunjukkan bahwa negara demokrasi lebih mungkin menciptakan kondisi yang diperlukan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dibandingkan dengan negara-negara rezim non-demokrasi atau rezim hibrida. Tingkat kesetaraan gender secara keseluruhan lebih tinggi di negara demokrasi, akses ke kekuasaan politik lebih setara, pada umumnya lebih sedikit korupsi, lebih banyak kesejahteraan dasar, dan biasanya lebih mudah untuk memulai usaha di negara demokrasi. Oleh karena itu, pilihannya bukan antara bentuk negara non-demokrasi atau tidak bebas atau hibrida dengan negara demokrasi. Dunia memerlukan negara demokrasi yang lebih banyak dan lebih baik, untuk memulihkan kembali janji demokrasi.

Pada November 2017, International IDEA meluncurkan edisi pertama dari laporan dua tahunannya yang baru, *Global State of Democracy*. Laporan ini memberikan analisis dan data berbasis bukti mengenai keadaan demokrasi global dan regional, dengan fokus pada ketahanan demokrasi. Laporan ini juga berkontribusi pada perdebatan publik tentang demokrasi, intervensi kebijakan yang terinformasi, dan pendekatan pemecahan masalah yang teruji atas tantangan yang dihadapi di negara-negara demokrasi di seluruh dunia.

Ikhtisar ini juga menyajikan ringkasan dari isi edisi kedua, *Global State of Democracy 2019*. Buku ini menguraikan perkembangan demokrasi selama empat dekade terakhir, juga tren-tren jangka pendek, dengan fokus pada perkembangan kunci sejak 2013.

Bab 1

Kerangka Kerja Konseptual

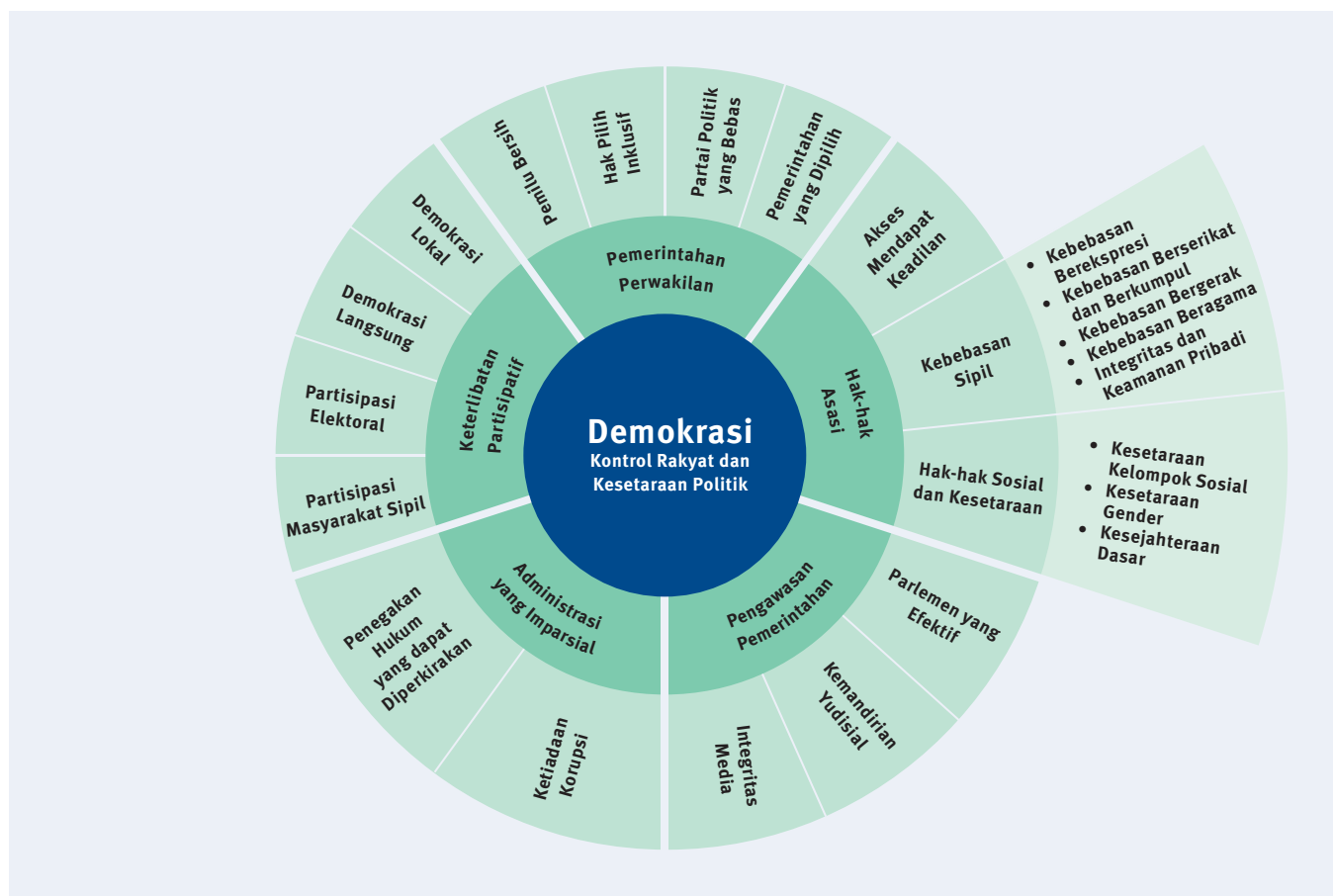
Indeks GSoD berfungsi sebagai basis bukti utama bagi Laporan Keadaan Demokrasi Global. Indeks ini memberikan pengukuran baru dan komprehensif atas demokrasi, berdasarkan kerangka penilaian Keadaan Demokrasi International IDEA, yakni sebuah alat yang didesain untuk para pembuat kebijakan dalam menilai kualitas demokrasi (International IDEA 2008). Alat ini dikembangkan oleh staf International IDEA dengan dukungan para ahli eksternal

dan atas supervisi dewan penasihat yang terdiri atas para ahli terkemuka di bidang pengukuran demokrasi.

Indeks GSoD adalah alat kuantitatif untuk mengukur evolusi demokrasi dalam aspek-aspeknya yang beragam secara longitudinal, dimulai dari 1975 sampai sekarang. Indeks itu menangkap tren-tren pada tingkat global, regional, dan nasional. Kerangka kerja konseptual yang menopang Indeks

GAMBAR 1.1

Kerangka Kerja Konseptual Global State of Democracy



Sumber: International IDEA, *The Global State of Democracy Indices Methodology: Conceptualization and Measurement Framework* [Metodologi Indeks Global State of Democracy: Kerangka Konseptualisasi dan Pengukuran] (Stockholm: International IDEA, 2018b), <<https://doi.org/10.31752/idea.2018.66>>.

ini (Gambar 1.1) menerjemahkan definisi International IDEA mengenai demokrasi—yang menekankan pengendalian rakyat terhadap proses pembuatan keputusan publik dan terhadap pembuat keputusan, serta kesetaraan warga negara dalam pelaksanaan pengendalian tersebut—ke dalam lima atribut utama demokrasi yang terdiri dari 16 subatribut dan 97 indikator. Indeks ini didasarkan pada 12 sumber data yang berbeda, yang bagian terbesarnya dihasilkan oleh proyek Varieties of Democracy (V-Dem).

Kerangka kerja konseptual yang menyangga Indeks GSoD dan Global State of Democracy 2019 bertujuan untuk dapat diterima secara universal dan sesuai dengan pengaturan kelembagaan yang berbeda. Dengan menggunakan pemahaman demokrasi yang luas, Indeks GSoD tidak menyajikan sebuah indeks demokrasi menyeluruh dengan skor tunggal bagi setiap negara, sehingga memungkinkan negara-negara demokrasi tersebut diberikan peringkat. Pendekatan ini membedakan Indeks GSoD dari beberapa metodologi pengukuran demokrasi lainnya dan memungkinkan analisis dan pemahaman demokrasi yang lebih beragam.

Selain itu, dibandingkan pengukuran demokrasi lainnya, Indeks GSoD berbeda dari aspek tingkat cakupannya yang luas dalam hal tahun (sejak 1975, dengan pemutakhiran tahunan) dan jumlah negara (158); penggabungan dan penggunaan sumber data yang berbeda; dan adanya perkiraan ketidakpastian bagi pengguna; yang memungkinkan mereka menilai apakah perbedaan-perbedaan skor itu secara statistik signifikan. Untuk perbandingan yang lebih rinci antara indeks GSoD dan pengukuran lainnya lihat International IDEA (2018b).

Indeks GSoD terdiri atas skor atribut dan subatribut per negara per tahun (negara–tahun). Penilaiannya ada dalam rentang skor 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan pencapaian terendah dalam sampel dan 1 adalah yang tertinggi.

Global State of Democracy 2019 memperkenalkan suatu klasifikasi rezim politik berdasarkan Indeks GSoD. Klasifikasi bertujuan memfasilitasi pemahaman Indeks, meningkatkan analisis dan memastikan relevansi kebijakan yang lebih besar dari data. Indeks GSoD mendefinisikan secara luas tiga tipe rezim politik: (a) negara demokrasi (dengan kinerja beragam), (b) rezim hibrida dan (c) negara non-demokrasi.

Perulangan pertama Indeks GSoD mencakup periode 1975–2015. Data dimutakhirkan setiap tahun dan karenanya laporan ini mencakup data hingga tahun 2018, tetapi bukan untuk 2019. Indeks GSoD sekarang meliputi 158 negara di dunia. Kebijakan diambil untuk mengecualikan negara-

Lima Atribut Demokrasi dalam Kerangka Kerja Konseptual GSoD

Atribut 1: Pemerintahan Perwakilan

Pemerintahan Perwakilan mencakup sejauh mana akses ke kekuasaan politik bebas dan setara sebagaimana ditunjukkan melalui pemilu yang kompetitif, inklusif, dan teratur. Hal ini meliputi empat subatribut: Pemilu Bersih, Hak Pilih Inklusif, Partai Politik yang Bebas, dan Pemerintahan yang Dipilih

Atribut 2: Hak Asasi Manusia

Hak Asasi menangkap sejauh mana kebebasan sipil di dihormati, dan apakah rakyat memiliki akses ke sumber daya dasar yang memungkinkan partisipasi aktif mereka dalam proses politik. Aspek ini bertumpang tindak secara signifikan dengan persetujuan internasional tentang hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Atribut ini meliputi tiga subatribut, yakni Akses mendapat Keadilan, Kebebasan Sipil, serta Hak-hak Sosial dan Kesetaraan. Atribut ini juga mencakup subkomponen berikut; Kebebasan Berekspresi, Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Kebebasan Bergerak, Kebebasan Beragama, Integritas dan Keamanan Pribadi, Kesetaraan Kelompok Sosial, Kesetaraan Gender, dan Kesejahteraan Dasar

Atribut 3: Pengawasan Pemerintahan

Pengawasan Pemerintahan mengukur pengendalian yang efektif atas kekuasaan eksekutif. Hal ini meliputi tiga subatribut, yakni Parlemen yang Efektif, Kemandirian Yudisial, dan Integritas Media.

Atribut 4: Administrasi yang Imparsial

Administrasi yang Imparsial memerhatikan bagaimana keputusan politik yang adil dan dapat diprediksi diimplementasikan, dan oleh karenanya mencerminkan aspek kunci supremasi hukum. Hal ini meliputi dua subatribut, yakni Ketidadaan Korupsi dan Penegakan Hukum yang Dapat Diperkirakan.

Atribut 5: Keterlibatan Partisipatif

Keterlibatan Partisipatif mengukur partisipasi warga negara secara formal dan informal dalam proses politik. Karena menangkap fenomena yang berbeda, subatribut pada aspek ini—Partisipasi Masyarakat Sipil, Partisipasi Elektoral, Demokrasi Langsung dan Demokrasi Lokal—tidak digabungkan dalam suatu indeks tunggal.

negara dengan penduduk kurang dari satu juta karena ketersediaan data yang tidak merata di negara tersebut.

Indeks GSoD juga mencakup enam wilayah: Afrika, Asia dan Pasifik, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah dan Iran (disebut dalam laporan sebagai Timur Tengah), dan Amerika Utara. Pengelompokan negara dalam wilayah ini terutama mengikuti logika geografis, di samping juga memperhitungkan tautan historis dan budaya, khususnya di subdivisi regional. Untuk informasi lebih jauh mengenai penentuan geografis wilayah-wilayah dalam Indeks GSoD lihat International IDEA (2017a).

Bab 2

Temuan Utama Global

Bab ini menyajikan suatu ikhtisar perkembangan demokrasi global selama empat dekade terakhir, serta penggambaran tren jangka pendek, dengan berfokus pada perkembangan kunci sejak 2013.

Tren Demokrasi yang Memberi Harapan: Kemajuan dan Peluang

Analisis dalam Global State of Democracy 2019 mencerminkan data dalam Indeks GSoD untuk periode

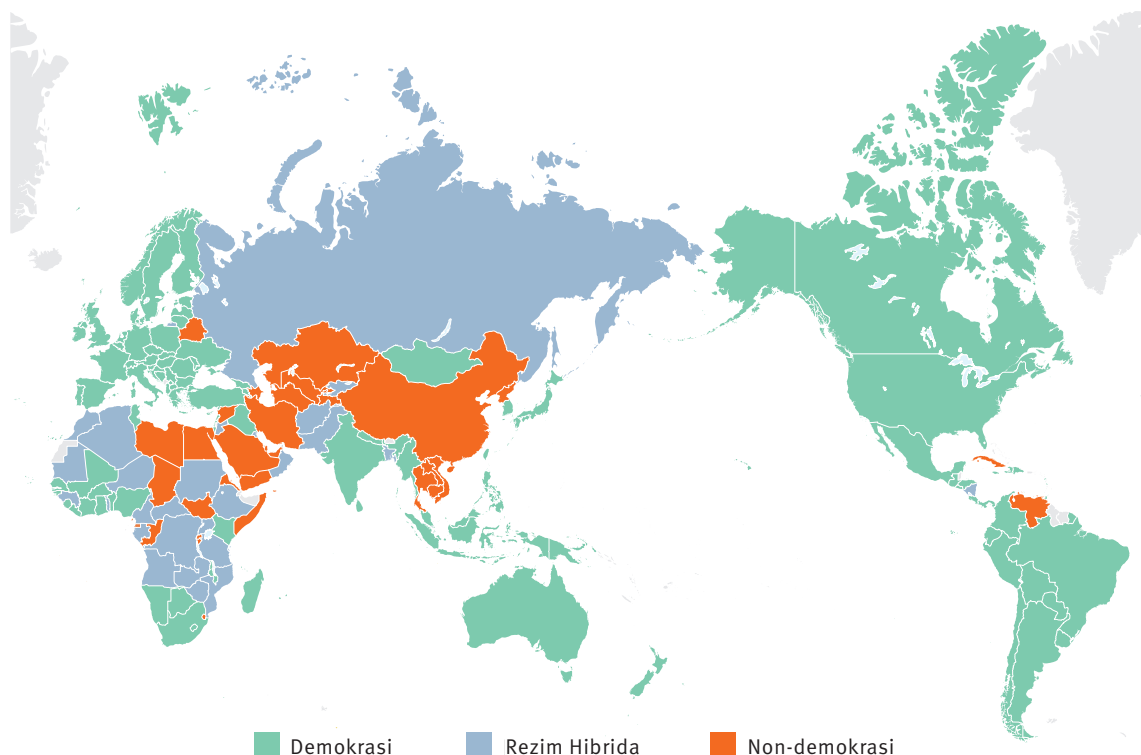
1975-2018, yang menunjukkan bahwa cakupan demokrasi terus meluas di seluruh dunia, yang ditandai dengan terus bertambahnya jumlah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi juga terbukti tangguh dalam kurun waktu panjang. Terlebih lagi, negara-negara demokrasi memungkinkan terciptanya kondisi yang lebih baik bagi pembangunan berkelanjutan ketimbang rezim hibrida atau rezim non-demokrasi.

Jumlah Negara Demokrasi Terus Bertambah

- **Dunia lebih demokratis daripada sebelumnya.** Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.1,

GAMBAR 2.1

Peta Dunia Berdasarkan Tipe Rezim, 2018



Catatan: Area daratan yang ditandai dengan warna abu-abu tidak dimasukkan dalam analisis karena merupakan teritori atau memiliki populasi kurang dari satu juta penduduk.

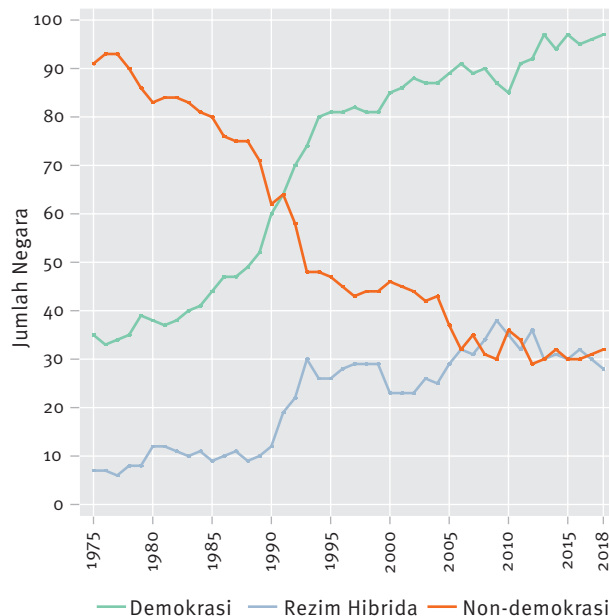
Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsoi-indices>>.

lebih dari separuh negara di dunia (62 persen, atau 97 negara) sekarang adalah negara demokratis (dibandingkan dengan hanya 26 persen pada 1975), dan lebih dari setengah (57 persen) penduduk dunia dan lebih dari empat miliar orang, sekarang tinggal di beberapa bentuk negara demokrasi, dibandingkan 36 persen pada 1975. Porsi negara non-demokrasi sudah berkurang lebih dari separuhnya sejak 1975 (68 persen negara pada 1975 menjadi hanya 20 persen pada 2018) (Gambar 2.2 dan 2.3).

- **Mayoritas (72 persen) negara demokrasi saat ini dibangun setelah 1975 sebagai bagian dari apa yang disebut gelombang ketiga demokratisasi.** Dari jumlah tersebut, lebih dari tiga perempat negara mengalami transisi demokrasi sebelum tahun 2000 (awal gelombang ketiga), sedangkan kurang dari seperempat bertransisi setelah 2000. Selebihnya 28 persen negara demokrasi di dunia sekarang, yang semuanya terbentuk sebelum 1975, telah mengalami demokrasi tanpa terputus dari tahun 1975 sampai sekarang, kecuali Sri Lanka.
- **Demokrasi sekarang dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia.** Di Amerika Utara dan Eropa, 100

GAMBAR 2.2

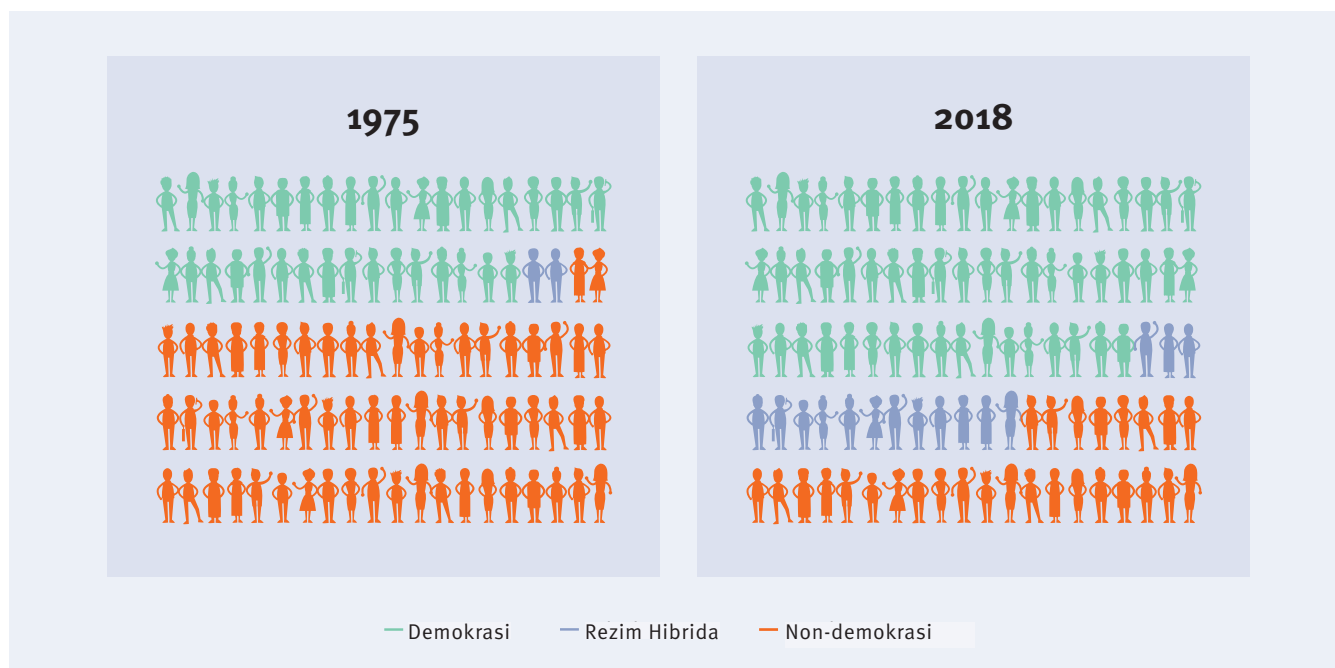
Tipe-tipe Rezim, 1975–2018



Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsoi-indices>>.

GAMBAR 2.3

Populasi yang Tinggal di Setiap Tipe Rezim, 1975–2018



Sumber: World Bank: World Development Indicators [Indikator Pembangunan Dunia], 2019; International IDEA, The Global State of Democracy Indices (2019a) [Indeks Global State of Democracy], <<http://www.idea.int/gsoi-indices>>.

persen dan 93 persen negara adalah negara demokrasi, diikuti oleh Amerika Latin dan Karibia (86 persen negara). Eropa memiliki porsi terbesar dari negara demokrasi dunia (39 negara, atau 40 persen dari total global), diikuti oleh Afrika (21 persen dan 20 negara demokrasi), serta Amerika Latin dan Karibia (20 persen dan 19 negara demokrasi). Di Asia, jumlah negara demokrasi sama dengan gabungan jumlah rezim hibrida dan non-demokrasi, sedangkan di Afrika dan Timur Tengah negara demokrasi terdapat di kurang dari separuh negara di kawasan itu (masing-masing 41 persen dan 17 persen) (Gambar 2.4).

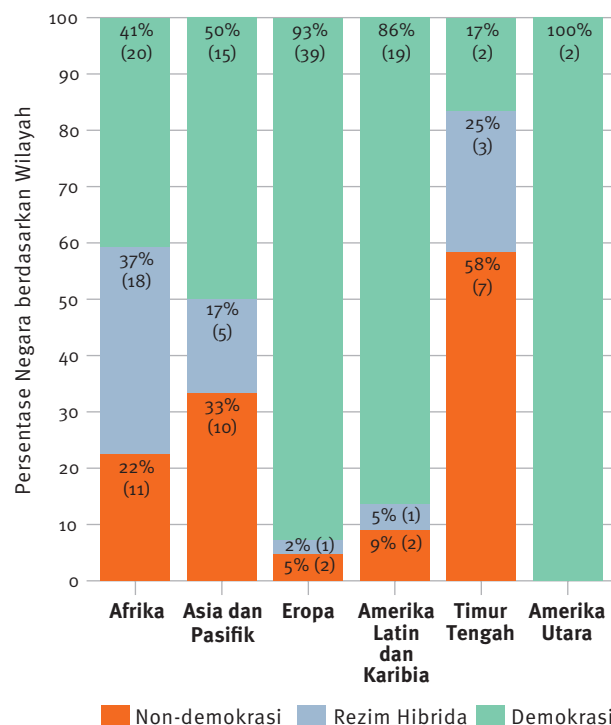
- **Terdapat variasi demokrasi di antara subwilayah.** Subwilayah yang paling demokratis di dunia adalah Oceania, Eropa Utara dan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Timur-Eropa Tengah, yang hanya terdiri dari negara demokrasi. Subwilayah lain dengan bagian negara demokrasi yang besar adalah Amerika Selatan (90 persen), Amerika Tengah (86 persen), Karibia (80 persen), dan Afrika Barat (73 persen).
- **Demokrasi muncul dalam banyak bentuk dan format.** Sejumlah 23 pola kinerja demokrasi yang berbeda dapat diidentifikasi di antara 97 negara demokrasi di dunia. Akan tetapi, hanya sedikit persentase negara demokrasi (22 persen) yang tinggi kinerjanya di seluruh atribut demokrasi. Proporsi terbesar dari bagian ini adalah negara-negara demokrasi yang lebih tua yang berlokasi di Eropa Utara dan Eropa Barat, meskipun dapat juga ditemukan di seluruh wilayah dunia, kecuali di Timur Tengah. Kinerja menengah di seluruh atribut juga merupakan pola kinerja yang umum, yakni ada 20 negara di dunia masuk kategori ini. Selebihnya 56 negara demokrasi berkinerja lebih baik di beberapa aspek demokrasi dibandingkan aspek lainnya, dalam 21 konstelasi kinerja yang berbeda (Gambar 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara demokrasi di dunia beragam baik dalam hal kinerja demokrasi maupun pola kinerja

Kemajuan Demokrasi Berlanjut ke Seluruh Dunia

- **Jumlah negara demokrasi terus bertambah.** Peningkatan ini terjadi sekalipun terjadi pelambatan perluasan demokrasi secara global sejak pertengahan tahun 1990-an (Gambar 2.2). Pada kenyataannya, antara tahun 2008 dan 2018 jumlah negara demokrasi terus bertambah, yakni dari 90 ke 97. Oleh karena itu, data ini tidak mendukung hipotesis “pembalikan” gelombang ketiga demokratisasi (yaitu penurunan yang signifikan dan berkelanjutan jumlah negara

GAMBAR 2.4

Jumlah dan Persentase Tipe Rezim per Wilayah, 2018

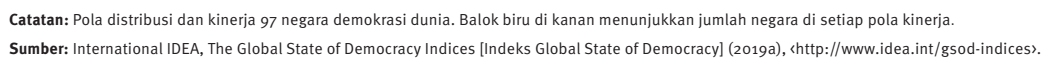


Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

demokrasi).

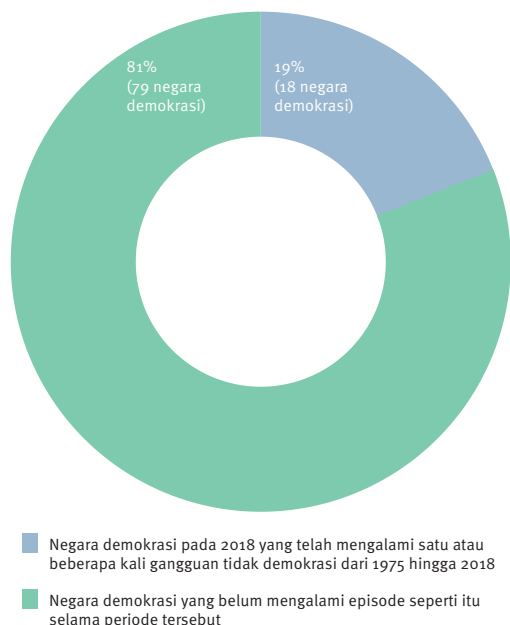
- **Demokrasi terus menyebar ke negara-negara yang belum pernah mengalami demokrasi.** Dalam 10 tahun terakhir (yakni sejak 2008), 11 negara mengalami transisi demokrasi untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Empat dari transisi ini terjadi empat tahun terakhir: Burkina Faso dan Myanmar pada tahun 2015, Armenia dan Malaysia pada tahun 2018. Hal ini lebih banyak daripada dasawarsa sebelumnya dan sama dengan jumlah transisi demokrasi baru dalam dasawarsa pertama pada gelombang ketiga demokrasi (1975–1985).
- **Tuntutan rakyat untuk demokrasi terdengar di negara yang belum pernah mengalami demokrasi.** Pada tahun 2018, protes dan tuntutan perubahan demokratis di Armenia dan Malaysia—keduanya dipandang sebagai rezim hibrida yang bertahan

Pola Kinerja Demokrasi pada 2018, Tingkat Global



GAMBAR 2.6

Porsi Negara dengan Ketahanan Demokrasi, 2018



Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

lama—berujung pada terjadinya transisi demokratis di kedua negara itu. Protest di Aljazair, Mesir, Hong Kong dan Sudan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa aspirasi demokrasi kuat dan menemukan ekspresinya bahkan dalam konteks rezim hibrida ataupun non-demokrasi. Negara-negara lainnya (seperti Ethiopia) belum mengalami transisi demokrasi tetapi sedang mengalami reformasi demokrasi yang menunjukkan prospek menjanjikan bagi berawalnya demokrasi.

Demokrasi Telah Terbukti Tangguh Dalam Jangka Panjang

- Mayoritas yang besar (81 persen) dari 97 negara demokrasi di dunia telah terbukti tangguh secara demokrasi, yakni mampu menjaga status demokrasi mereka tanpa terputus sejak 1975 atau sejak mereka bertransisi ke demokrasi (Gambar 2.6).
- Negara demokrasi yang lebih tua telah menunjukkan lebih banyak ketahanan demokrasi daripada negara demokrasi gelombang ketiga.** Sejumlah 28 negara di dunia adalah negara demokrasi sebelum 1975, saat gelombang ketiga demokratisasi dimulai. Demokrasi terganggu hanya di dua dari negara-negara ini: Sri Lanka, yang ditransisikan kembali ke demokrasi pada 2015, dan Venezuela, yang merupakan satu-satunya

negara yang mengalami kemunduran demokrasi secara bertahap selama dua dasawarsa terakhir dan akhirnya menjadi negara non-demokrasi pada 2017.

- Negara demokrasi gelombang ketiga terbukti relatif tangguh, meskipun kurang bila dibanding negara demokrasi yang lebih tua.** Dari 83 negara yang bertransisi ke demokrasi setelah 1975, lebih dari setengahnya (64 persen) tetap menjadi negara demokrasi tanpa terputus. Dari negara demokrasi gelombang ketiga saat ini, 76 persen tetap menjadi negara demokrasi tanpa terputus sejak masa transisinya.
- Lebih dari setengah (56 persen) dari negara-negara yang mengalami kegagalan demokrasi secara parsial atau sepenuhnya setelah 1975, sekarang telah kembali ke demokrasi

Demokrasi Sebagai Hal yang Memungkinkan Terjadinya Pembangunan Berkelanjutan

International IDEA memandang demokrasi sebagai aspirasi universal umat manusia dan sebagai tujuan yang layak untuk dikejar karena nilai intrinsiknya bagi masyarakat. Akan tetapi, International IDEA juga meyakini bahwa demokrasi memiliki nilai instrumental, sebagai hal yang memungkinkan terwujudnya pembangunan berkelanjutan (International IDEA 2018a: 5–9).

Global State of Democracy 2019 menghasilkan sejumlah dukungan terhadap pandangan ini, sekalipun tetap mengakui bahwa lebih banyak penelitian diperlukan di luar statistik deskriptif untuk mengkaji kapan, bagaimana, dan dalam keadaan apa demokrasi dapat mengarah pada hasil akhir yang lebih berkelanjutan dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. International IDEA mengakui bahwa tipe rezim hanyalah salah satu faktor yang berperan ketika menentukan hasil pembangunan berkelanjutan dan karenanya bukan kondisi yang cukup untuk penentuan ini. Memang, sejumlah negara demokrasi memiliki tingkat pembangunan berkelanjutan yang rendah. Karena alasan ini, *Global State of Democracy 2019* tidak mengklaim hubungan kausalitas yang langsung antara demokrasi dan pembangunan berkelanjutan.

Akan tetapi, Indeks GSoD memberikan sejumlah dukungan untuk klaim berikut terkait hubungan asosiatif antara demokrasi dan aspek tertentu pembangunan berkelanjutan:

- Negara demokrasi umumnya mengungguli rezim hibrida dan non-demokrasi pada aspek yang biasanya tidak dianggap inti demokrasi.** Kerangka

kerja GSoD menggabungkan karakteristik demokrasi yang lebih luas ketimbang banyak konsepsi demokrasi lainnya, termasuk aspek-aspek seperti Kesejahteraan Dasar, Akses Mendapat Keadilan, Kesetaraan Gender, Kesetaraan Kelompok Sosial dan Ketidadaan Korupsi, yang berkaitan dengan pembangunan sosial, manusia dan ekonomi. Dalam definisi demokrasi lainnya, dimensi-dimensi ini seringkali lebih dipandang sebagai hasil akhir demokrasi, ketimbang bagian dari karakteristik demokrasi (Munck 2016). Tatkala beberapa rezim hibrida dan non-demokrasi berkinerja tinggi pada aspek-aspek ini, mereka lebih menjadi pengecualian, ketimbang sebagai norma. Demokrasi bukan merupakan kondisi yang cukup untuk kinerja yang tinggi dan tidak semua negara demokrasi berkinerja baik pada aspek-aspek ini. Akan tetapi, negara demokrasi lebih mungkin memiliki kinerja yang tinggi dibandingkan rezim hibrida atau non-demokrasi.

- Rata-rata, negara demokrasi memiliki tingkat **Hak**

TABEL 2.1

Angka Rata-rata Berdasarkan Tipe Rezim dan Aspek Demokrasi, 2018

Atribut	Angka Rata-rata Indeks GSoD		
	Demokrasi (n=97)	Rezim Hibrida (n=28)	Rezim Non-demokrasi (n=32)
Hak asasi Manusia	0.69	0.50	0.37
Kesetaraan Gender	0.64	0.51	0.44
Kesejahteraan Dasar	0.68	0.50	0.57
Ketidadaan Korupsi	0.54	0.37	0.30
Indeks Pembangunan Manusia (UNDP)	0.74	0.62	0.66

Catatan: Angka Indeks Pembangunan Manusia berasal dari tahun 2017 dan tidak dimasukkan dalam kumpulan data Indeks GSoD. Sel berwarna hijau menunjukkan skor rata-rata tertinggi.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>; United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Index [Indeks Pembangunan Manusia], 2018, <<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>>.

Asasi Manusia yang lebih tinggi (termasuk Akses Mendapat Keadilan, menikmati Kebebasan Sipil dan Hak-hak Sosial serta Kesetaraan) daripada rezim hibrida dan non-demokrasi (Tabel 2.1). Semua negara dengan tingkat Hak Asasi Manusia yang tinggi adalah negara demokrasi. Sebaliknya, 59 persen negara non-demokrasi memiliki tingkat Hak Asasi Manusia yang rendah. Hanya ada dua negara demokrasi dengan level Hak Asasi Manusia yang rendah: Haiti dan Turki.

- Rata-rata, negara demokrasi memiliki tingkat **Kesetaraan Gender** yang lebih tinggi daripada negara non-demokrasi dan rezim hibrida (Tabel 2.1). Semua, kecuali satu negara dengan tingkat Kesetaraan gender yang tinggi adalah negara demokrasi, dalam kasus ini hanya satu negara non-demokrasi (Rwanda). Setengah negara non-demokrasi memiliki tingkat Kesetaraan Gender yang rendah. Hanya tiga negara demokrasi (Irak, Papua Nugini dan Turki) yang memiliki tingkat Kesetaraan Gender yang rendah.
- Rata-rata, negara-negara demokrasi memiliki tingkat **Kesejahteraan Dasar** yang lebih tinggi (yang dalam Indeks GSoD mengagregasi indikator seperti nutrisi, literasi, harapan hidup dan kesetaraan kesehatan) dan **Pembangunan Manusia** (United Nations Development Programme [Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa] 2018) daripada rezim non-demokrasi atau rezim hibrida (Tabel 2.1). Hampir separuh negara demokrasi dunia (48 persen) memiliki tingkat Kesejahteraan Dasar yang tinggi, sedangkan hal itu hanya terjadi pada 28 persen dari negara non-

TABEL 2.2

Rata-rata GDP per Kapita Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Perwakilan, 1975 dan 2018

Tingkat Pemerintahan Perwakilan	Rata-rata GDP per Kapita dalam Dollar AS Saat Ini		Penambahan
	1975	2018	
Rendah	1,490	7,000	5 kali
Menengah	1,031	13,105	13 kali
Tinggi	5,812	49,789	9 kali

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>; World Bank, World Development Indicators [Indikator Pembangunan Dunia], 2018a, <<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>>.

demokrasi dan 11 persen rezim hibrida.

- Aspek demokrasi yang memiliki korelasi tertinggi dengan Kesejahteraan Dasar dan Pembangunan Manusia adalah **Ketiadaan Korupsi**. Dengan kata lain, semakin korup suatu negara, semakin mungkin negara itu memiliki tingkat Pembangunan Manusia yang rendah dan demikian pula sebaliknya.
- Rata-rata, negara demokrasi memiliki **tingkat korupsi yang jauh lebih rendah** daripada rezim non-demokrasi dan hibrida (Tabel 2.1). Lebih dari dua pertiga (78 persen) rezim non-demokrasi memiliki tingkat korupsi yang tinggi, sebagaimana 64 persen dari rezim hibrida, sedangkan tidak ada rezim non-demokrasi memiliki tingkat korupsi yang rendah. Kenyataannya bahwa hanya satu rezim hibrida

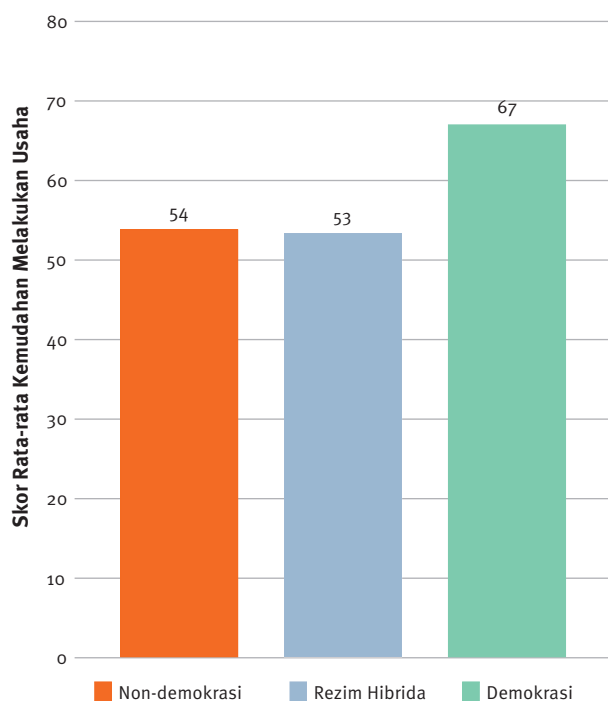
(Singapura) memiliki tingkat korupsi yang rendah mengkonfirmasi bahwa Singapura lebih merupakan pengecualian daripada norma. Sebagai perbandingan, hanya 25 persen negara demokrasi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi.

Berdasarkan Indeks GSoD dan beberapa studi akademik, **kinerja ekonomi dan lingkungan juga tampak berbeda menurut tipe rezim**, meskipun kaitan kausalitas langsung tidak diklaim dalam *Global State of Democracy 2019*:

- Indeks GSoD menemukan bahwa negara demokrasi dengan tingkat **Pemerintahan Perwakilan** yang tinggi dan menengah telah mencapai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) jangka panjang yang lebih tinggi dibanding rezim non-demokrasi dengan tingkat Pemerintahan Perwakilan yang rendah. (Tabel 2.2). Terlebih lagi, transisi dari non-demokrasi ke demokrasi ditemukan meningkatkan PDB per kapita sekitar 20 persen untuk 25 tahun, dibandingkan tingkat pendapatan di negara-negara yang tetap non-demokrasi (Acemoglu *et al.* 2019: 48).
- **Negara demokrasi lebih baik untuk melakukan usaha.** Negara demokrasi menyediakan peraturan yang lebih baik untuk usaha dan melindungi hak milik lebih efektif daripada tipe rezim lainnya. Angka rata-rata Skor Kemudahan Melakukan Usaha, World Bank (World Bank 2018b) adalah 67 untuk negara demokrasi, dibandingkan 53 untuk rezim hibrida dan 54 untuk non-demokrasi (Gambar 2.7). Tipe rezim juga signifikan ketika mengontrol faktor lainnya dalam analisis regresi.
- **Negara demokrasi diasosiasikan dengan tingkat rata-rata kinerja lingkungan yang lebih tinggi daripada non-demokrasi.** Skor rata-rata negara demokrasi adalah 72 dari 100 untuk Indeks Kinerja Lingkungan, dibandingkan rata-rata 62 untuk non-demokrasi dan 59 untuk rezim hibrida. Indeks Kinerja Lingkungan mengukur seberapa baik negara melindungi kesehatan manusia dari bahaya lingkungan dan melestarikan ekosistem yang vital. Akan tetapi, perbedaan ini kehilangan signifikansinya ketika mengontrol tingkat pendapatan (Wendling *et al.* 2018).

GAMBAR 2.7

Skor Rata-rata Kemudahan Melakukan Usaha Berdasarkan Tipe Rezim, 2018



Catatan: Skor Kemudahan Melakukan Usaha membandingkan ekonomi dengan memperhatikan praktik pengaturan yang baik. Skor 2018 untuk Indeks GSoD negara berkisar antara 20 dan 87, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>. World Bank, Ease of Doing Business Score [Skor Kemudahan Melakukan Usaha], 2018b, <<https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>>.



Tren Demokrasi yang Mengkhawatirkan: Tantangan-tantangan

TABEL 2.3

Negara Demokrasi dengan Kinerja Lemah dan Sangat Lemah, 2018

Wilayah	Negara Demokrasi Berkinerja Lemah	Negara Demokrasi Berkinerja Sangat Lemah
Afrika	Burkina Faso, Tanjung Gading, Gambia, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Tunisia	Guinea-Bissau, Madagaskar
Asia dan Pasifik	Malaysia, Myanmar, Papua Niugini	
Eropa	Georgia, Moldova, Ukraina	Turki
Amerika Latin dan Karibia	Republik Dominika, Guatemala, Honduras	Haiti
Timur Tengah	Lebanon	Irak

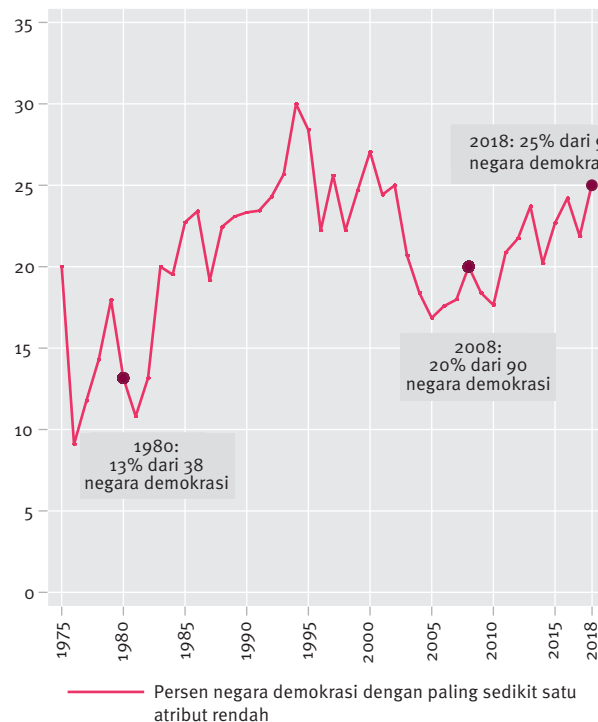
Catatan: Kinerja lemah didefinisikan dengan skor rendah pada paling sedikit satu atribut demokrasi (kecuali skor negara tinggi pada empat atribut lainnya), sedangkan kinerja sangat lemah didefinisikan sebagai skor rendah pada paling sedikit dua atribut.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

GAMBAR 2.8

Negara dengan Kinerja Rendah Pada Paling Sedikit Satu Atribut Demokrasi, 1975–2018



Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

Meskipun apabila diamati di sebagian besar wilayah di dunia terdapat capaian-capaian demokrasi yang signifikan dan jumlah negara demokrasi terus bertambah – yang tidak mendukung hipotesis bahwa saat ini terjadi “pembalikan” gelombang ketiga demokrasi – terlihat tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan bahwa demokrasi mengalami erosi. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh sejumlah tantangan, termasuk penurunan kualitas demokrasi di negara-negara dengan demokrasi yang lebih tua maupun negara gelombang ketiga demokrasi, serta tantangan yang berkenaan dengan kesulitan dalam memenuhi harapan warga negara terhadap kinerja demokrasi yang tinggi dan berkeadilan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kinerja Demokrasi Tetap Lemah

- **Kinerja dan kualitas demokrasi di banyak negara demokrasi gelombang ketiga tetap lemah dan proporsi negara demokrasi yang lemah meningkat.** Negara demokrasi yang skornya rendah pada paling sedikit satu atribut demokrasi disebut sebagai negara demokrasi lemah. Negara dengan karakteristik semacam itu dicirikan dengan keberadaan lembaga-

lembaga, proses, dan praktik demokrasi formal serta informal yang lemah. Proporsi negara demokrasi dengan kinerja demokrasi yang lemah telah bertambah satu dasawarsa terakhir, yakni dari 20 persen pada 2008 menjadi 25 persen pada 2018 (Gambar 2.8). Dari negara-negara demokrasi yang lemah ini, hanya sedikit lebih dari setengah (13 negara) bertransisi ke demokrasi antara tahun 1975 dan 2000, tetapi tetap dalam keadaan demokrasi yang rapuh dan rentan gagal. Sementara negara yang selebihnya, sedikit kurang dari separuhnya (11), bertransisi ke demokrasi setelah tahun 2000.

- **Afrika adalah wilayah dengan proporsi terbesar negara demokrasi lemah.** Akan tetapi, negara demokrasi lemah juga ada hampir di seluruh wilayah dunia, dengan empat negara di masing-masing Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa; tiga di Asia dan Pasifik; dan dua negara demokrasi di Timur Tengah (Tabel 2.3).
- **Bertambahnya porsi negara dengan kinerja**

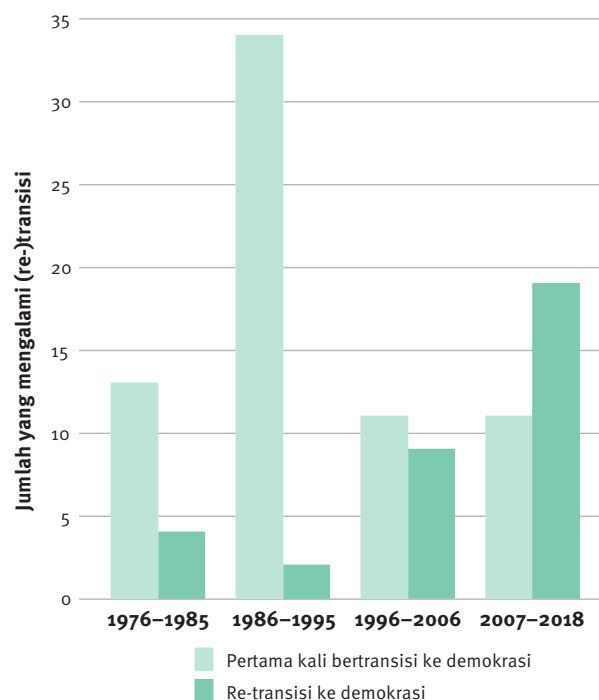
demokrasi lemah khususnya tampak dari aspek seperti Hak Asasi Manusia, Partisipasi Masyarakat Sipil dan Partisipasi Elektoral. Penurunan Hak Asasi Manusia khususnya terlihat dalam aspek yang terkait dengan Akses Mendapat Keadilan dan Kebebasan Sipil—sebagian besar berhubungan dengan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul serta Integritas dan Keamanan Pribadi, juga Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Beragama. Sejak tahun 2016, porsi negara dengan tingkat Pemilu Bersih yang rendah juga terlihat sedikit meningkat (dari 20 persen menjadi 23 persen negara).

Demokrasi Tetap Rentan di Beberapa Konteks Transisional

- Mayoritas negara yang mengalami transisi demokrasi setelah 1975 telah mempertahankan status demokrasi tanpa terputus. Akan tetapi, sekitar 36 persen negara telah mengalami kerapuhan demokrasi dan kegagalan demokrasi secara parsial (ke rezim hibrida) atau kegagalan sepenuhnya (ke non-demokrasi) pada titik tertentu selama empat dekade terakhir. Lebih dari setengah negara-negara ini (17 jumlahnya) telah kembali ke demokrasi (dan dilabeli demokrasi rapuh), sedangkan 13 negara selebihnya tetap negara hibrida atau non-demokrasi.
- Meningkatnya jumlah re-transisi ke demokrasi menunjukkan kerapuhan demokrasi sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga. Dalam periode 2007-2018, ada 19 transisi semacam itu – lebih banyak dua kali lipat dibandingkan dekade sebelum

GAMBAR 2.9

Transisi Demokrasi Pertama Kali dan Re-transisi Berdasarkan Dekade, 1976–2018



Catatan: Beberapa negara mungkin memiliki pengalaman beberapa kali re-transisi dalam satu dekade dan karenanya mungkin dihitung lebih dari satu kali. Transisi menuju demokrasi pertama kali merujuk pada negara yang mengalami transisi demokrasi setelah 1975 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, sedangkan re-transisi adalah negara yang bertransisi ke demokrasi setelah 1975, mengalami kegagalan demokrasi secara parsial atau secara sepenuhnya, dan kemudian kembali ke demokrasi.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

TABEL 2.4

Negara Demokrasi Rapuh dan Lemah, 2018

Kombinasi Kerapuhan dan Kelemahan	Afrika	Eropa	Amerika Latin dan Karibia	Timur Tengah
Rapuh dan Lemah	Gambia, Kenya, Mali, Nigeria	Georgia	Republik Dominika, Honduras	Lebanon
Sangat Rapuh dan Lemah	Guinea-Bissau			
Rapuh dan Sangat Lemah	Madagaskar	Turki		
Sangat Rapuh dan Sangat Lemah			Haiti	

Catatan: Negara demokrasi yang lemah dan rapuh sesuai definisi yang diberikan dalam naskah.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

itu (Gambar 2.9). Seluruh negara tersebut mengalami transisi menuju demokrasi pada titik tertentu setelah tahun 1975, kemudian mengalami kegagalan demokrasi, baik secara parsial (ke hibrida), atau secara total (ke non-demokrasi), kemudian kembali lagi ke rezim demokrasi. Contoh yang terkini, ialah termasuk Sri Lanka (2015), Haiti (2016), Gambia (2017), dan Lebanon (2018). Oleh karena itu, pada saat jumlah negara demokrasi di dunia terus meningkat secara kuantitatif, kualitas demokrasi di banyak negara ini tetap rendah dan tetap dalam kondisi rentan.

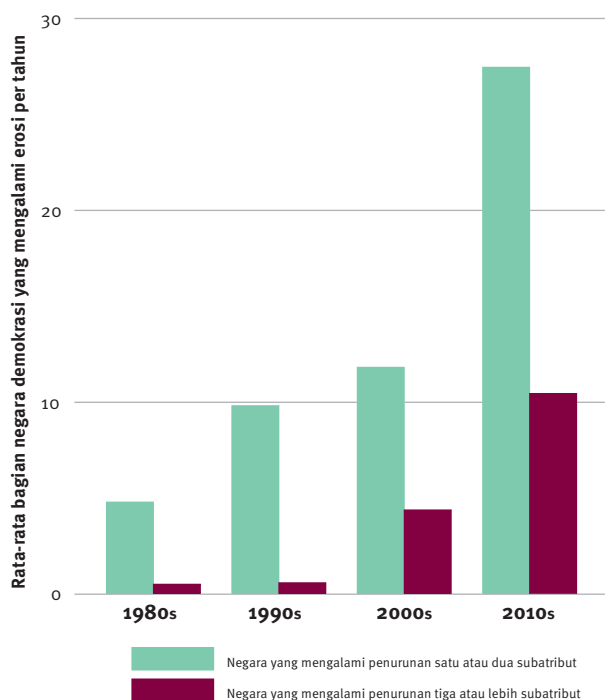
- **Mayoritas negara dengan kegagalan demokrasi sebagian atau sepenuhnya mengalami hanya satu episode seperti itu.** Akan tetapi, 9 dari 30 negara mengalami beberapa kali kegagalan sejak 1975, dan 4 di antaranya (Guinea-Bissau, Haiti, Nepal dan Sri Lanka) sekarang ini telah kembali ke demokrasi (patut diingat Guinea-Bissau dan Haiti juga negara demokrasi lemah). Enam negara (Bangladesh,

Nicaragua, Niger, Zambia dan yang paling mutakhir Pakistan) yang sebelumnya mengalami kegagalan demokrasi tetap berada dalam bentuk rezim hibrida, sedangkan Thailand tetap menjadi negara non-demokrasi hingga 2019.

- **Afrika memiliki porsi terbesar negara demokrasi rapuh.** Sebanyak tujuh negara demokrasi rapuh (contohnya yang kembali ke demokrasi) berada di Afrika, tetapi di Amerika Latin dan Karibia, Eropa, serta Asia dan Pasifik juga terdapat negara demokrasi rapuh. Dua pertiga negara demokrasi rapuh merupakan negara gelombang ketiga demokrasi yang awal (yakni yang bertransisi sebelum tahun 2000), sedangkan selebihnya adalah negara demokrasi gelombang ketiga yang bertransisi setelah tahun 2000.
- **Kelemahan dan kerapuhan demokrasi saling terkait erat.** Dua pertiga (12 dari 18) negara demokrasi rapuh (yaitu telah mengalami interupsi

GAMBAR 2.10

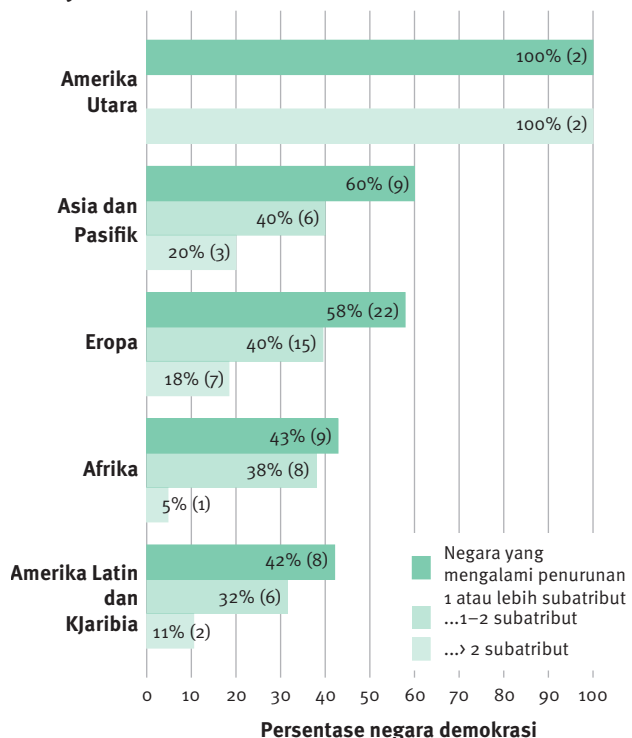
Penurunan Signifikan di Satu atau Lebih Subatribut Demokrasi, 1980-an hingga 2010-an



Catatan: Gambar ini menunjukkan persentase negara demokrasi per wilayah yang mengalami erosi demokrasi.

GAMBAR 2.11

Porsi Negara dengan Erosi Demokrasi Berdasar Wilayah, 2018



Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

menjadi non-demokrasi) adalah juga negara demokrasi lemah yang kinerjanya rendah. Setengah dari negara demokrasi yang lebih lemah telah mengalami paling sedikit sekali interupsi menjadi non-demokrasi sejak transisi pertama mereka ke demokrasi dan stabilitas demokrasinya bisa dianggap rapuh. Bagian terbesar dari negara demokrasi yang lemah, berkualitas rendah dan rapuh berada di Afrika, tetapi juga ada di Amerika Latin dan Karibia, di Eropa dan di Timur Tengah (Tabel 2.4). Kelemahan demokrasi dan rendahnya kualitas demokrasi menjadikan negara demokrasi lebih rentan mengalami kemunduran menuju kegagalan secara parsial (menjadi hibrida) atau kegagalan sepenuhnya (menjadi non-demokrasi), sehingga semakin merapuhkan demokrasi negara itu.

Erosi Demokrasi Sedang Meningkat

- **Porsi negara demokrasi yang mengalami erosi demokrasi telah meningkat secara konsisten dalam**

GAMBAR 2.12

Kinerja Tinggi pada Lima Atribut Indeks GSoD, 1975–2018



Catatan: Gambar ini menunjukkan persentase negara dengan kinerja tinggi pada seluruh atribut Indeks GSoD secara longitudinal. Hal ini menggambarkan bagaimana kualitas demokrasi menurun pada negara yang sebelumnya berkinerja tinggi.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsoi-indices>>.

satu dekade terakhir ini, dan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam dekade terakhir dibandingkan dengan dekade sebelumnya (Gambar 2.10). Indeks GSoD mendefinisikan erosi demokrasi sebagai penurunan signifikan secara statistik pada paling sedikit satu subatribusi demokrasi selama kurun waktu lima tahun negara itu berada dalam demokrasi. Pengikisan demokrasi dapat terjadi pada tingkat pembangunan demokrasi yang berbeda.

- Pada 2018, setengah (50 persen) negara demokrasi dunia mengalami erosi demokrasi, dengan penurunan pada paling sedikit satu subatribusi demokrasi, dan 15 persen mengalami penurunan pada tiga atau lebih subatribusi.
- Hampir setengah dari populasi dunia (43 persen) tinggal di negara-negara yang telah mengalami beberapa bentuk erosi demokrasi dalam lima tahun terakhir.
- Wilayah-wilayah dengan porsi terbesar dari negara demokrasi yang mengalami erosi demokrasi adalah Amerika Utara, Asia dan Pasifik, serta Eropa (Gambar 2.11). Erosi demokrasi memengaruhi lebih dari setengah negara demokrasi di wilayah ini, dan sedikit lebih rendah dari separuh negara demokrasi di Afrika serta Amerika Latin dan Karibia (masing-masing 43 persen dan 42 persen) (Gambar 2.11). Secara kasar, setengah dari negara-negara, baik yang termasuk negara demokrasi yang lebih tua (48 persen) dan negara demokrasi gelombang ketiga (53 persen) telah mengalami erosi demokrasi dalam lima tahun terakhir. Negara demokrasi yang terlihat mengalami erosi demokrasi yang meluas lima tahun terakhir – dilihat dari jumlah subatribusi demokrasi yang menurun – adalah enam negara demokrasi gelombang ketiga (Brazil, Hungaria, Kenya, Polandia, Rumania dan Turki), serta dua negara demokrasi yang lebih tua: India dan Amerika Serikat.
- Pada 2014, dalam tanda erosi demokrasi global lainnya, negara-negara dengan penurunan demokrasi yang signifikan dalam Hak Asasi Manusia mulai melebihi jumlah yang mengalami kemajuan signifikan. Terlebih lagi, pada 2016, untuk pertama kalinya sejak 1975, jumlah negara dengan penurunan signifikan dalam Pemerintahan Perwakilan dan Pengawasan Pemerintahan mulai lebih besar daripada negara-negara dengan kemajuan yang signifikan.
- **Tatkala kelemahan dan kerapuhan demokrasi memengaruhi sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga, terdapat juga tanda-tanda bahwa**

kualitas negara demokrasi dunia yang berkinerja tinggi mulai terkikis. Tanda erosi ini sangat kuat pada satu dekade terakhir. Kinerja tinggi dalam konteks ini mengacu pada skor tinggi untuk semua lima atribut demokrasi. Meskipun jumlah negara demokrasi sudah meningkat lebih dari dua kali lipat selama empat dekade terakhir, proporsi negara demokrasi dengan kinerja tinggi di semua lima atribut demokrasi telah berkurang setengah dalam periode waktu yang sama (dari 47 persen pada 1980 menjadi 22 persen pada 2018). Dalam satu dekade terakhir saja (yakni sejak 2008), porsi negara demokrasi yang berkinerja tinggi telah berkurang dari 27 persen menjadi 22 persen (Gambar 2.12).

- **Aspek demokrasi yang telah banyak terkikis di negara-negara demokrasi berkinerja tinggi adalah yang terkait dengan ruang gerak kebebasan sipil.** Indeks GSoD mengukur erosi ini melalui indikator Partisipasi Masyarakat Sipil, Integritas Media dan Kebebasan Sipil (khususnya Kebebasan Beragama, Integritas dan Keamanan Pribadi, serta Kebebasan Berekspresi) juga Partisipasi Elektoral dan Partai Politik yang Bebas. Penurunan juga terlihat dalam Kemandirian Yudisial. Porsi negara dengan kinerja tinggi pada Kemandirian Yudisial, Partai Politik yang Bebas, serta Integritas dan Keamanan Pribadi lebih rendah pada tahun 2018 dibandingkan tahun 1990, sedangkan Integritas Media dan Kebebasan Berekspresi telah mundur ke tingkat tahun 1990-an.

Terdapat Peningkatan Tanda-tanda Kemunduran Demokrasi

- **Kemunduran demokrasi, bentuk pengikisan demokrasi tertentu yang melibatkan pelemahan bertahap secara disengaja terhadap mekanisme perimbangan kekuasaan dan pembatasan kebebasan sipil, telah menjadi lebih sering terjadi pada dekade terakhir.** Indeks GSoD mendefinisikan kemunduran demokrasi sebagai pelemahan secara bertahap dan disengaja terhadap pengawasan pemerintahan dan akuntabilitas lembaga, disertai dengan penurunan kebebasan sipil.
 - Terdapat 10 negara di dunia saat ini mengalami kemunduran demokrasi. Kasus yang paling parah adalah Hungaria, Polandia, Rumania, Serbia dan Turki. Akan tetapi, negara-negara seperti India, Filipina dan Ukraina juga terpengaruh. Di Nikaragua (2016) dan Pakistan (2018), kemunduran itu begitu parah sehingga mengakibatkan regresi ke hibriditas (kegagalan demokrasi parsial).

- **Venezuela mewakili kemunduran demokrasi yang paling parah dalam empat dekade terakhir.** Venezuela adalah satu-satunya negara yang pernah menjadi negara demokrasi dengan tingkat Pemerintahan Perwakilan yang tinggi pada tahun 1975, dan kini menjadi non-demokrasi.
- **Salah satu hal yang membedakan kemunduran demokrasi modern dengan bentuk kegagalan demokrasi tradisional adalah lamanya proses kemunduran.** Rata-rata panjang episode kemunduran yang diamati dalam Indeks GSoD adalah sembilan tahun.
- **Rendahnya tingkat dukungan rakyat terhadap demokrasi serta polarisasi sosial dan politik tampaknya terkait dengan meningkatnya kemungkinan dan tingkat kemunduran.**
- Presiden dan pemerintahan yang populis cenderung membuat kemunduran demokrasi lebih mungkin terjadi dan meningkatkan derajat penurunan demokrasi.
- Negara-negara dengan pangsa perdagangan luar negeri yang lebih tinggi tampaknya lebih rentan menghadapi kemunduran demokrasi, sehingga mendukung pandangan yang menafsirkan kemunduran itu terkait dengan ketakutan terhadap globalisasi ekonomi di antara kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.
- **Tingkat Parlemen yang Efektif dan Partisipasi Masyarakat Sipil yang lebih tinggi tampaknya secara efektif mencegah dimulainya proses kemunduran,** mengurangi kemungkinan kemunduran demokrasi yang terus menerus dan mengurangi cakupan kemunduran demokrasi itu.

Beberapa Negara Demokrasi Menjadi Semakin Terhibrida

- **Proporsi rezim hibrida telah bertambah dalam dekade terakhir ini.** Rezim hibrida muncul di negara-negara yang mengadopsi fasad demokrasi (seringkali dalam bentuk pemilu yang berkala, walaupun tidak kompetitif), pada umumnya disertai dengan pembatasan yang ketat atas Kebebasan Sipil dan hak-hak demokrasi lainnya. Jumlah rezim hibrida telah bertambah lebih dari empat kali lipat sejak 1975, yakni dari 7 negara (atau 5 persen negara) menjadi 28 negara (atau 18 persen) pada 2018.

- **Lebih dari setengah rezim hibrida di dunia ada di Afrika.** Timur Tengah juga memiliki sejumlah besar rezim seperti itu. Rezim hibrida ditemukan di seluruh wilayah kecuali di Amerika Utara. Pada 2018 Pakistan dan Tanzania menjadi negara demokrasi yang paling mutakhir beregresi ke rezim hibrida.
- **Hibriditas bukan tahapan transisi menuju demokrasi, tetapi dalam mayoritas kasus, karakteristik rezim.** Dari total rezim hibrida di dunia, 71 persen tidak pernah menjadi demokrasi. Kurang dari sepertiga (30 persen) negara demokrasi gelombang ketiga mengalami fase hibrida sebelum bertransisi ke demokrasi. Bagian yang sangat kecil (20 persen) rezim hibrida dan non-demokrasi di dunia mengalami gangguan demokrasi pada titik tertentu di empat dekade terakhir.
- **Akan tetapi, pada 2018, dua rezim hibrida yang paling bertahan lama di dunia, bertransisi ke demokrasi: Armenia and Malaysia.** Malaysia menjadi demokrasi setelah lebih dari empat dekade berada dalam rezim hibriditas, menyusul Pemilihan Umum 2018 yang mengakhiri monopoli Barisan Nasional

(*National Front Coalition*) sebagai dampak dari oposisi yang bersatu dan masyarakat sipil yang kuat. Armenia, rezim hibrida sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, dilanda gelombang protes rakyat pada 2018 yang mengakibatkan perdana menteri dan presiden yang telah lama berkuasa mengundurkan diri, dan berikutnya, kemenangan pemilu bagi oposisi. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa aspirasi demokrasi rakyat yang kuat ada bahkan di rezim yang belum pernah mengalami demokrasi.

- **Hibriditas dikaitkan dengan kelemahan dan kerapuhan demokrasi.** Untuk kurang dari setengah negara demokrasi yang rapuh, hibriditas adalah tahapan transisional bagi mereka yang teregresi ke non-demokrasi (transisi terbalik). Bagi negara demokrasi rapuh yang lainnya, gangguan tidak demokrasi menjerumuskan mereka ke rezim hibriditas, tetapi hal itu tidak pernah mengakibatkan pembalikan sepenuhnya ke non-demokrasi.

Rezim Non-demokrasi Bertahan dan Memperdalam Otokratisasinya

- **Negara non-demokrasi dan rezim hibrida bersama-**

TABEL 2.5

Negara yang Mengalami Otokratisasi Makin Dalam, 2013–2018

	Jumlah Subatribut Menurun 2013–2018	Dalam Kategori Hibrida	Peralihan dari Kategori Hibrida ke Non-demokrasi	Dalam Kategori Non-demokrasi
Venezuela	8		2017	
Yaman	8			X
Burundi	7			X
Sudan Selatan	5			X
Mesir	3			X
Mauritania	3			X
Togo	3	X		
Bahrain	3			X
Kamboja	3		2018	

Catatan: Rezim hibrida atau non-demokrasi yang mengalami penurunan signifikan pada paling sedikit tiga subatribut demokrasi selama periode lima tahun.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

sama masih merepresentasikan 38 persen negara. Lebih dari 3 miliar manusia atau 43 persen populasi dunia hidup di rezim seperti itu. Proporsi negara non-demokrasi telah berkurang secara signifikan dalam dekade terakhir (dari 68 persen negara menjadi hanya 20 persen).

- Rezim non-demokrasi meliputi rezim otokrasi, otoritarian, penguasa satu partai, rezim militer, monarki otoritarian dan negara gagal atau tercabik perang, negara-negara yang dilanda konflik tanpa monopoli terpusat atas penggunaan kekuatan.
- Di sebagian besar rezim non-demokrasi, kebebasan sipil cenderung dibatasi secara sistematis. Seringkali tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas. Peradilan biasanya dikendalikan oleh eksekutif, partai politik oposisi seringkali dilarang bergerak dengan bebas, dan media cenderung dibatasi secara sistematis, demikian juga suara-suara kritis dalam masyarakat sipil. Meskipun, dalam negara non-demokrasi yang merupakan negara gagal dan negara yang dilanda perang saudara, eksekutif biasanya tidak memiliki kekuasaan represif otokratis terhadap peradilan dan partai oposisi.
- Proporsi penduduk yang hidup di negara non-demokrasi (28 persen) tetap signifikan karena sejumlah negara non-demokrasi (yakni China, Mesir dan Arab Saudi) memiliki penduduk yang besar. Negara non-demokrasi ditemukan di seluruh wilayah dunia, kecuali Amerika Utara. Timur Tengah adalah wilayah yang paling tidak demokratis di dunia, dengan lebih dari setengah (58 persen) negaranya menjadi negara non-demokrasi. Dari 32 negara non-demokrasi di dunia, bagian terbesar (34 persen) berada di Afrika, diikuti oleh Asia dan Pasifik (31 persen), serta Timur Tengah dan Iran (22 persen). Subwilayah yang paling tidak demokratis di dunia adalah Asia Tengah, yang tidak pernah memiliki negara demokrasi, dan Afrika Tengah, yang pada 2018 tidak ada negara demokrasinya. Afrika Utara dan Afrika Timur masing-masing hanya memiliki satu negara demokrasi.
- Bahkan di dalam negara non-demokrasi, terdapat pola kinerja yang beragam. Beberapa negara non-demokrasi mendapat skor rendah di seluruh atribut demokrasi—hampir setengah dari seluruh negara non-demokrasi (16) dapat ditemukan dalam kategori ini di seluruh wilayah dengan rezim seperti ini—sedangkan yang lainnya mendapat skor menengah di beberapa atributnya. Uni Emirat Arab adalah satu-satunya negara non-demokrasi yang mendapat skor tinggi pada sebuah

atribut demokrasi, yaitu Administrasi yang Imparsial (karena level korupsinya yang rendah). Jika kinerja pada tingkat subatribut atau subkomponen dianalisis, beberapa negara non-demokrasi juga mendapat skor sangat tinggi pada beberapa aspek. Kuba, misalnya, mendapat skor pada 25 persen teratas di dunia untuk Kesejahteraan Dasar dan Kesetaraan Gender.

- Porsi yang signifikan dari negara non-demokrasi di dunia sangat kokoh dan tidak pernah mengalami demokrasi. Lebih dari separuh negara non-demokrasi di dunia (18 dari 32) dan mayoritas (73 persen) dari negara hibrida dan non-demokrasi disatukan belum pernah menjadi demokrasi sejak 1975. Pengaruh dari negara non-demokrasi yang terus menerus ini terhadap lanskap demokrasi global tidak boleh diremehkan. Tindakan China (dan Rusia) di Venezuela, yang memberikan rezim Nicolás Maduro pinjaman yang menguntungkan dengan imbalan minyak bersubsidi, dipandang sebagai faktor kunci dalam memelihara kekuasaan rezim. Dalam kasus Kamboja, pinjaman keuangan tanpa-ikatan kepada pemerintah dari China, sebagai tambahan atas investasi ekonomi yang besar, juga telah dipandang sebagai kunci untuk memahami otokratisasi yang semakin mendalam di negara itu, yang menolong melindungi rezim dari tekanan internasional. China menanamkan modal di seluruh wilayah dunia dan juga dilaporkan menggunakan pengaruh politik dan ekonominya dengan mengeksport teknologi pengawasan ke rezim-rezim non-demokrasi.
- Pada saat sejumlah rezim hibrida dan non-demokrasi telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam indikator demokrasi mereka selama 10 tahun terakhir, sejumlah signifikan negara juga telah menjadi semakin otokratik. Proses ini (disebut sebagai otokrasi yang mendalam) didefinisikan dalam Indeks GSoD sebagai penurunan yang signifikan pada paling sedikit tiga subatribut demokrasi dari rezim hibrida atau non-demokrasi selama periode lima tahun (Tabel 2.5). Di beberapa kasus, hal ini telah mendorong sejumlah rezim hibrida menjadi non-demokrasi, sebagaimana kasus di Venezuela pada 2017 dan Kamboja pada 2018. Jumlah negara yang mengalami otokrasi yang mendalam telah meningkat satu dekade terakhir, dan sekarang mencapai puncaknya sejak 1975.

Menyempitnya Ruang Sipil

- Perluasan demokrasi global dalam empat dekade terakhir telah memungkinkan transformasi ruang sipil di seluruh wilayah di dunia. Perluasan ini disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi (TIK) serta oleh transformasi partai politik, yakni dengan pergeseran dari keterlibatan individual di luar struktur organisasi formal, mobilisasi warga negara dan jejaring, menuju bentuk-bentuk interaksi yang lebih longgar dan cair, yang seringkali difasilitasi oleh media sosial.

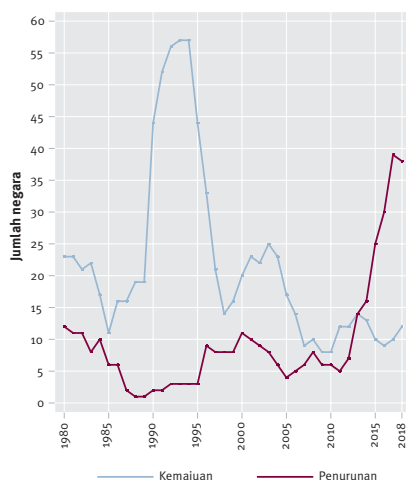
- Terdapat dua tantangan utama terkait ruang sipil; menyempitnya ruang sipil dan munculnya lebih banyak elemen yang tidak kondusif bagi kewargaan dalam masyarakat sipil.
- Di seluruh wilayah dunia dan seluruh tipe rezim, ruang sipil menyempit. Indeks GSoD menunjukkan sebagian besar negara menurun pada aspek-aspek demokrasi yang terkait ruang sipil. Penurunan ini terlibat dalam berbagai konteks, termasuk erosi demokrasi, kemunduran demokrasi, dan otokrasi yang mendalam. Hal ini memiliki implikasi yang serius bagi kesehatan dan keberlanjutan demokrasi—ruang sipil yang dinamis adalah kunci dalam membangun dan mempertahankan demokrasi yang sehat dan melindunginya dari ancaman, seperti kemunduran demokrasi.
- Aspek ruang sipil yang nampak menurun di paling

banyak negara adalah **Kebebasan Sipil** (khususnya Kebebasan Berekspresi, juga Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Integritas dan Keamanan Pribadi, Kebebasan Beragama, dan Kebebasan Bergerak) serta **Integritas Media**. Tingkat **Partisipasi Masyarakat Sipil** juga nampak menurun secara signifikan di sejumlah negara. Sejak 2012–2013, ketiga aspek ini, untuk pertama kalinya selama lebih dari 40 tahun, lebih banyak negara mengalami penurunan daripada pencapaian (Gambar 2.13, 2.14 dan 2.15).

- Meskipun **Eropa** masih memiliki tingkat ruang sipil yang lebih tinggi daripada wilayah lain di dunia, Eropa menjadi wilayah yang nampak memiliki porsi terbesar dari negara-negara dengan penurunan dalam aspek ruang sipil, yakni Kebebasan Sipil dan Integritas Media. Sementara itu, Afrika, Asia dan Pasifik, serta Amerika Latin dan Karibia memiliki jumlah negara yang sama yang mengalami penurunan Integritas Media.
- Pada saat yang sama, ketika elemen yang tidak kondusif bagi kewargaan selalu ada di dalam masyarakat sipil, bentuk-bentuk baru telah mawujud dan mendapatkan suara yang lebih nyaring dan menjadi lebih terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini, seringkali dengan bantuan media sosial. Beberapa suara ini merupakan produk

GAMBAR 2.13

Kemajuan dan Penurunan dalam Kebebasan Sipil, 1980–2018

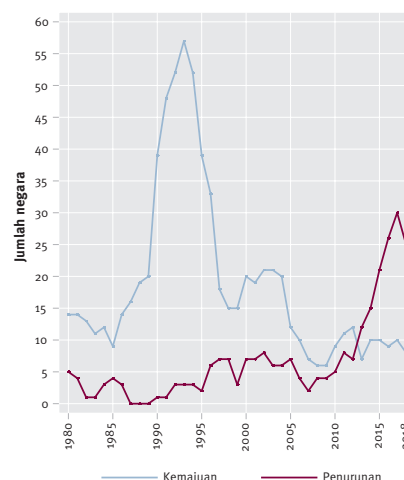


Catatan: Kemajuan dan penurunan merujuk pada negara-negara dengan penurunan atau kemajuan yang signifikan secara statistik selama periode lima tahun dari 1980 hingga 2018.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

GAMBAR 2.14

Kemajuan dan Penurunan dalam Integritas Media, 1980–2018

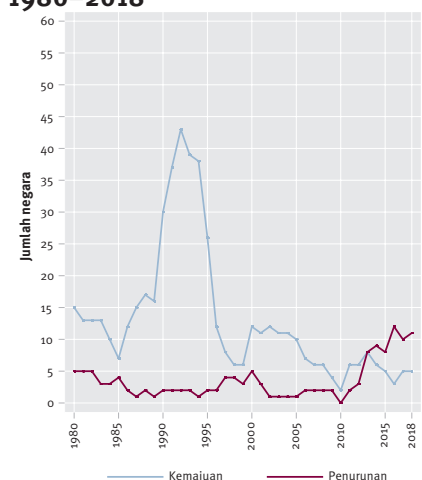


Catatan: Kemajuan dan penurunan merujuk pada negara-negara dengan penurunan atau kemajuan yang signifikan secara statistik selama periode lima tahun dari 1980 hingga 2018.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

GAMBAR 2.15

Kemajuan dan Penurunan dalam Partisipasi Masyarakat Sipil, 1980–2018



Catatan: Kemajuan dan penurunan merujuk pada negara-negara dengan penurunan atau kemajuan yang signifikan secara statistik selama periode lima tahun dari 1980 hingga 2018.

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global State of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>.

masyarakat demokratis dan hak-hak yang didapat secara konstitusional (misalnya kebebasan berekspresi) dan termasuk gerakan-gerakan ekstrim kanan di negara-negara demokrasi yang lebih tua seperti Jerman, Swedia atau Amerika Serikat.

Kemajuan pada Aspek Demokrasi Penting Lainnya Melambat

- **Aspek demokrasi yang kemajuannya sangat lambat selama empat dekade terakhir terkait dengan mengurangi korupsi, memajukan Kesetaraan Gender, meningkatkan Kesetaraan Kelompok Sosial, dan memperkuat Kemandirian Yudisial.**
- **Ketiadaan korupsi** adalah satu-satunya aspek demokrasi yang telah memburuk secara global dalam empat dekade terakhir, dengan 3 persen penurunan sejak 1975, kecuali di Amerika Latin dan Karibia. Proporsi negara demokrasi dengan tingkat korupsi yang tinggi telah naik dua kali lipat dalam 40 tahun: pada 1975, 9 persen negara demokrasi memiliki tingkat korupsi yang tinggi (3 dari 35), sedangkan pada 2018, proporsi itu meningkat jadi 25 persen negara demokrasi (24 dari 97). Oleh karena itu, demokrasi tidak memberikan suatu jaminan melawan korupsi. Korupsi tidak hanya mempengaruhi kepercayaan rakyat kepada politisi, tetapi juga berkontribusi pada rusaknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan demokrasi secara lebih luas. Korupsi memiliki implikasi yang serius terhadap keberlanjutan, stabilitas dan ketahanan negara demokrasi yang lebih tua dan juga yang lebih baru. Ketidakmampuan yang dialami sejumlah negara untuk mengekang korupsi secara efektif dipandang sebagai salah satu penyebab munculnya populisme. Pada saat yang sama, rezim non-demokrasi dan rezim hibrida pada umumnya lebih korup daripada negara demokrasi. Secara total, hampir separuh (43 persen) negara di dunia menderita karena tingginya tingkat korupsi.
- Indeks GSoD menunjukkan bahwa Ketidadaan Korupsi merupakan aspek demokrasi yang sangat berhubungan dengan Kesejahteraan Dasar (yang diintegrasikan dalam Indeks GSoD melalui indikator nutrisi, literasi, harapan hidup dan kualitas kesehatan). Tingginya tingkat korupsi karenanya menjadi penghambat bagi pembangunan manusia dan bagi pencapaian seluruh Agenda 2030.
- **Kesetaraan Kelompok Sosial**, yang mengukur kesetaraan dalam mengakses kekuasaan politik dan Kebebasan Sipil oleh kelompok sosial, hanya meningkat 10 persen, menjadikannya aspek yang kemajuannya

paling lambat kedua dalam kerangka kerja GSoD. Demikian pula, tingkat **Kemandirian Yudisial** global hanya meningkat 15 persen sejak 1975.

- **Dengan kecepatan kemajuan 10 tahun terakhir, maka akan dibutuhkan 46 tahun lagi untuk mencapai paritas gender di parlemen.** Hanya 24 persen kursi parlemen di dunia yang diduduki perempuan. Tidak ada rata-rata wilayah yang mencapai angka ‘minoritas kritis’ 30 perempuan legislator (International IDEA 2019b), meskipun beberapa subwilayah—termasuk Eropa Utara dan Eropa Barat (36 persen), Afrika Timur (34,5 persen), serta Amerika Tengah dan Meksiko (32 persen)—telah melakukannya (V-Dem 2019). Meskipun ada kemajuan-kemajuan ini, upaya serius masih diperlukan untuk mencapai kesetaraan politik bagi laki-laki dan perempuan.

Populisme Kembali Meningkat

- **Selama satu dekade terakhir, partai dan politisi populis telah meningkatkan jumlah pemilih mereka di banyak negara.** Kekecewaan terhadap partai politik yang dianggap kurang mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi telah mendorong banyak pemilih mendukung jalur tindakan politik alternatif, dengan demikian berkontribusi pada meningkatnya partai dan gerakan ekstrimis, baik dari spektrum politik kanan maupun kiri. Lebih dari separuh negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi modern selama satu dekade terakhir, mereka berada di bawah kepemimpinan pemerintahan populis.
- **Aktor-aktor populis tidak menghargai akuntabilitas lembaga-lembaga yang mengawasi pemerintah, melindungi pluralisme politik, dan membentuk demokrasi liberal.** Kecenderungan yang melekat pada kekuasaan yang tidak terbatas ini menjadikan populisme sebagai ancaman terhadap demokrasi. Namun beberapa pihak juga berpendapat bahwa kaum populis telah membantu memasukkan isu-isu penting ke dalam agenda publik (seperti korupsi dalam negara-negara demokrasi) yang seharusnya ditanggulangi dengan baik oleh negara-negara demokrasi, agar kembali mendapatkan legitimasinya.
- **Pendorong munculnya populisme bervariasi di berbagai negara, tetapi dapat dibagi secara luas menjadi faktor-faktor politik dan ekonomi.**
- **Faktor-faktor politik yang mendorong mobilisasi populis** meliputi krisis perwakilan partai politik tradisional; penurunan dalam keanggotaan partai; dan lebih banyaknya populasi kelas menengah yang

sadar politik dan termobilisasi. Faktor-faktor lainnya termasuk transformasi dan disintegrasi budaya politik yang disebabkan oleh meningkatnya individualisme; dan fragmentasi serta polarisasi ruang publik yang diperdalam dengan kemunculan teknologi baru dan media sosial.

- **Faktor-faktor ekonomi yang mendorong pemilih mendukung populisme** meliputi harapan-harapan terhadap demokrasi dari kelas menengah yang semakin kecewa terhadap capaian kinerja demokrasi yang dianggap lemah (misalnya dalam memajukan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja atau dalam mengurangi korupsi); transformasi pasar tenaga kerja yang disebabkan kemajuan teknologi, yang pada akhirnya meningkatkan disparitas sosial ekonomi dalam negeri; globalisasi dan hilangnya pengendalian nasional atas keputusan-keputusan kebijakan penting; dan kerentanan yang timbul dari krisis ekonomi dan finansial tahun 2008.
- **Indeks GSoD menunjukkan bahwa pemerintahan populis lebih menurunkan kualitas demokrasi dibandingkan pemerintahan non-populis.** Satu-satunya aspek demokrasi yang telah berkembang di bawah pemerintahan populis adalah Partisipasi Elektoral.

Prinsip-prinsip Elektoral Semakin Terdistorsi untuk Tujuan-tujuan Non-demokrasi

- **Sebanyak 62 persen negara di dunia sekarang menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif secara teratur dan dari total negara demokrasi di dunia, lebih dari separuhnya (59 persen) memiliki tingkat Pemilu Bersih yang tinggi.**
- **Pada saat pemilu telah menjadi norma lebih daripada perkecualian, banyak rezim non-demokratis menggunakan pemilu sebagai alat legitimasi internal**

dan eksternal. Dalam konteks negara yang dikuasai oleh rezim hibrida atau non-demokrasi, pemilu dapat digunakan sebagai sarana memperkuat fasad demokrasi. Distorsi prinsip-prinsip elektoral ini untuk tujuan-tujuan non-demokrasi dapat berkontribusi pada rusaknya kepercayaan publik terhadap nilai proses elektoral di negara demokrasi.

- **Sebagian besar proses elektoral yang terjadi di seluruh dunia berhasil mengatasi gangguan teknis yang tidak mengganggu serta tak dapat dihindari, dan mampu memfasilitasi transisi kekuasaan dengan tertib.** Akan tetapi, ketika dipertentangkan dengan tantangan-tantangan teknis yang serius dan upaya signifikan untuk mendelegitimasi, proses-proses elektoral dapat gagal memberi hasil yang kredibel dan terpercaya. Pemilu yang gagal dapat memicu krisis politik dengan efek negatif yang mendalam di masyarakat. Konteks terkini di mana ketidakteraturan dan kekurangan dalam proses elektoral, baik yang sungguh terjadi ataupun yang dirasakan, telah menyebabkan penundaan, pembatalan, sengketa ataupun pengulangan pemilu seperti terjadi di Kenya (2017); Republik Demokrasi Kongo, Irak dan Venezuela (2018); Turki, Nigeria dan Bolivia (2019).
- **Bagi negara-negara yang mengalami refomasi demokrasi yang signifikan sebagai bagian dari proses transisi, merevisi aturan elektoral dan memperkuat sistem elektoral merupakan kunci untuk menjamin keberlanjutan proses tersebut.** Selain itu, media sosial memungkinkan saluran komunikasi yang di dalamnya, desas-desus dan disinformasi bisa menyebar dalam tingkat yang belum terjadi sebelumnya, dan hal ini dapat pula berkontribusi pada rusaknya kepercayaan dalam proses-proses elektoral. Peraturan yang lebih ketat terhadap platform media sosial menjadi semakin dibutuhkan.

KOTAK 2.1

Teknologi Baru dan Demokrasi

Teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan media sosial, berkontribusi terhadap transformasi mendalam lanskap demokrasi global. Hal tersebut memunculkan potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk memperdalam demokrasi, di samping juga menciptakan tantangan dan risiko baru bagi demokrasi.



BOX 2.2

Temuan Utama: Demokrasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Indeks GSoD menyediakan data tambahan indikator resmi untuk melacak kemajuan delapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan khususnya TPB 16 and TPB 5.5 (Tabel 2.6 dan Gambar 2.16).¹

Berdasarkan Indeks GSoD, kemajuan global pada TPB 16 menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun juga tercatat beberapa kemajuan. Dari 18 indikator GSoD yang digunakan untuk mengukur kemajuan TPB 16, sebanyak 12 di antaranya turun signifikan. Hanya 5 indikator yang menunjukkan kemajuan, dan 1 indikator terlihat stagnan.

Target TPB 16 yang menghadapi tantangan terbesar, dengan lebih banyak penurunan ketimbang kemajuan, adalah TPB 16.1 tentang pengurangan kekerasan dan TPB 16.10 tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental.

Salah satu target yang mengalami lebih banyak kemajuan daripada penurunan adalah TPB 16.5 tentang mengurangi korupsi. Akan tetapi, lebih banyak perkembangan yang lebih berkelanjutan diperlukan pada target ini karena 43 persen negara di dunia masih berhadapan dengan tingkat korupsi yang tinggi, yang merupakan hambatan utama bagi pembangunan manusia.

Target yang menunjukkan kemajuan beragam, termasuk TPB 16.3 tentang supremasi hukum, dengan kemajuan dalam Akses ke Keadilan dan Penegakan Hukum yang Dapat Diperkirakan, tetapi turun dalam Kemandirian Yudisial; TPB 16.6 tentang lembaga yang efektif, terlihat menurun pada Kemandirian Yudisial, Partai Politik yang Bebas dan Partisipasi Masyarakat Sipil, tetapi menunjukkan kemajuan dalam Parlemen yang Efektif; dan TPB 16.7 tentang pembuatan keputusan yang inklusif, dengan penurunan dalam Pemilu yang Bersih dan Pemerintahan yang Dipilih; stagnasi dalam Partisipasi Elektoral dan Demokrasi Lokal serta mengalami kemajuan dalam Parlemen yang Efektif.



Kesetaraan Gender

TPB 5.5 tentang keterwakilan politik perempuan telah mengalami regresi, dengan dua negara mengalami penurunan sejak 2015 dan tidak ada negara yang mengalami kemajuan.

TABEL 2.6

Demokrasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

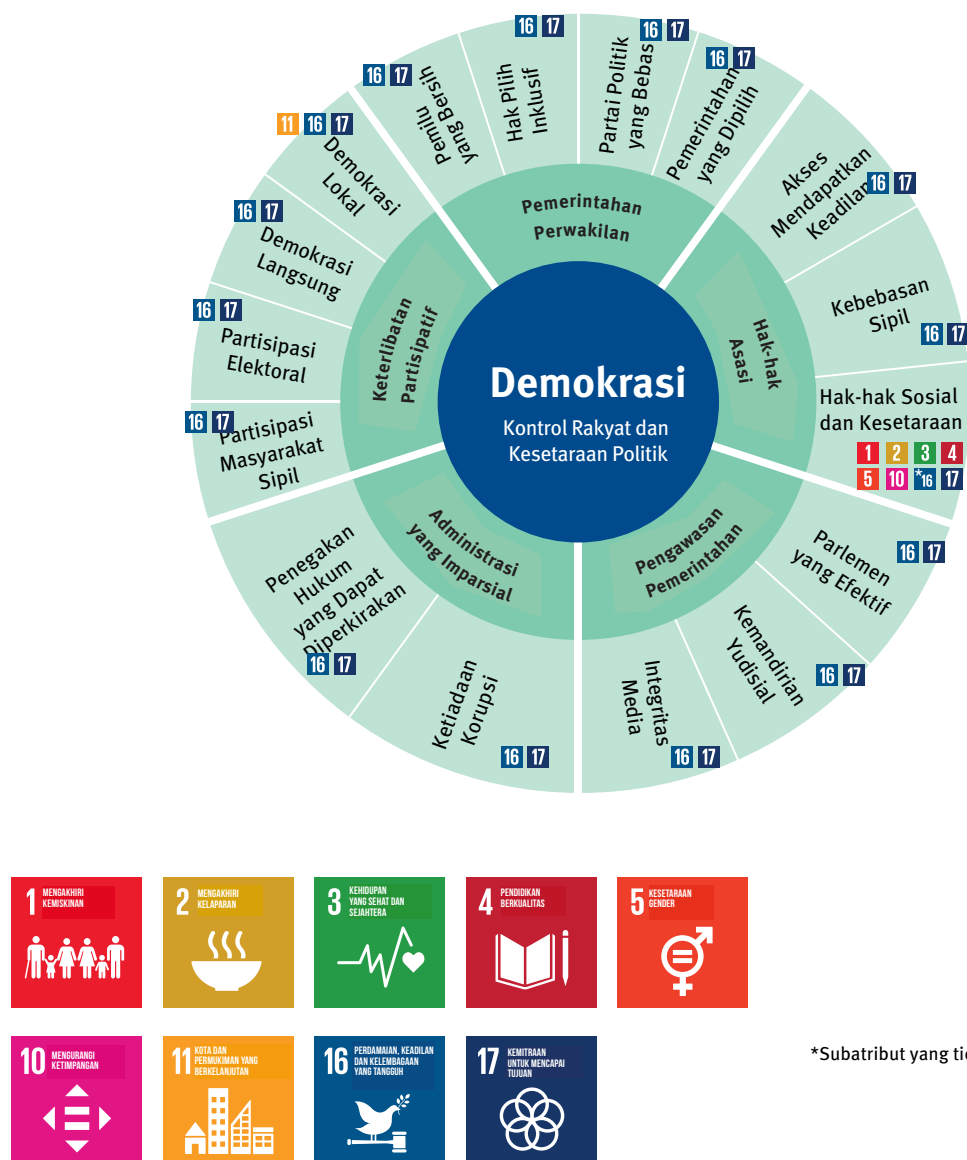
TARGET TPB	Uraian	Kemajuan
Target 16.1	Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian terkait kekerasan secara signifikan di manapun	Menurun ↓
Target 16.3	Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua	Kemajuan Beragam
Target 16.5	Mengurangi korupsi dan suap secara signifikan dalam segala bentuknya	Maju ↑
Target 16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di seluruh tingkatan	Kemajuan Beragam
Target 16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di seluruh tingkatan	Kemajuan Beragam
Target 16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan fundamental, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional	Menurun ↓
Target 5.5	Memastikan partisipasi perempuan secara penuh dan efektif untuk kepemimpinan di seluruh tingkatan pembuatan keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan kehidupan publik	Menurun ↓

Sumber: International IDEA, The Global State of Democracy Indices [Indeks Global state of Democracy] (2019a), <<http://www.idea.int/gsoi-indices>>; United Nations General Assembly, 'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development [Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan]', UN Document A/RES/70/1, 21 Oktober 2015, <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=En>.

¹ Metodologi untuk melacak kemajuan TPB 16 dengan Indeks GSoD dijelaskan dalam International IDEA, 'Tracking progress on Sustainable Development Goal 16 with the Global State of Democracy Indices' [Melacak Kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16 dengan Indeks Global State of Democracy], GSoD In Focus No. 8, September 2019.

GAMBAR 2.16

Kerangka Kerja Konseptual GSoD dan Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Bab 3

Temuan Utama Regional

Indek GSoD terdiri dari 97 indikator yang mengukur tren dalam pembangunan demokrasi di 158 negara, yang terbagi ke dalam enam wilayah utama: Afrika, Asia dan Pasifik, Eropa, Amerika Latin dan Karibia, Timur Tengah,

dan Amerika Utara. Global State of Democracy 2019 menyajikan suatu ikhtisar keadaan demokrasi di wilayah-wilayah ini; bagian ini meringkas temuan-temuan regional yang terdapat dalam laporan lengkap.

Temuan Regional: Afrika dan Timur Tengah

Temuan Regional: Afrika



Perkembangan Positif

- Perluasan demokrasi di Afrika sejak 1975 adalah yang terpesat kedua setelah Amerika Latin dan Karibia. Afrika mengalami ekspansi demokrasi yang luar biasa dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak awal 1990-an ketika banyak negara di wilayah ini memperkenalkan pemilu multipartai.
- Pada 1975, 41 negara merupakan non-demokrasi dan hanya tiga negara yang diklasifikasikan sebagai negara demokrasi. Pada 2018, proporsi negara demokrasi telah melonjak lima kali lipat menjadi 20 negara, menjadikan demokrasi tipe rezim yang paling umum di wilayah itu. (41 persen).
- Pemerintahan Perwakilan telah diperkuat di Afrika. Dari 20 negara yang dikategorikan sebagai negara demokrasi, mayoritas memiliki aspek tingkat Pemerintahan Perwakilan menengah. Akan tetapi, hanya satu negara (Mauritius) yang memiliki tingkat Pemerintahan Perwakilan yang tinggi.
- Antara 1975 dan 2018, capaian-capaian pada Pemerintahan Perwakilan diikuti dengan kemajuan-kemajuan pada Pengawasan Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia.
- Aspirasi demokrasi di Afrika tetap kuat. Mobilisasi rakyat yang menuntut perubahan demokrasi di negara-negara berpemimpin otoritatif yang berkuasa lama telah muncul akhir-akhir ini di Ethiopia (2014–2018) dan Gambia (2016), sehingga menghasilkan reformasi demokrasi yang baru dimulai di Ethiopia dan transisi demokrasi di Gambia setelah negara itu 22 tahun dalam penguasaan non-demokrasi. Protes pro-demokrasi yang besar yang mengguncang Aljazair, Mesir dan Sudan pada 2019 juga menjadi saksi atas bertumbuhnya tuntutan akan demokrasi dalam rezim hibrida dan non-demokrasi yang bertahan di wilayah ini.
- Kebebasan sipil adalah salah satu aspek demokrasi yang berkinerja terbaik di Afrika. Pada 2018, 33 persen negara memiliki tingkat Kebebasan sipil yang tinggi. Kinerja tinggi pada aspek ini terkonsentrasi di subwilayah Afrika Barat, diikuti oleh Afrika Selatan. Dari negara-negara yang mendapat skor tinggi pada aspek ini, 87 persen (14) adalah negara demokrasi, sementara hanya 12 persen (2) rezim hibrida. Tidak ada rezim non-demokrasi memiliki tingkat Kebebasan Sipil yang tinggi.
- Pemilu telah menjadi norma ketimbang perkecualian di seluruh Afrika. Hanya empat negara di wilayah ini (Eritrea, Libya, Somalia dan Sudan Selatan) tidak menyelenggarakan pemilu dalam bentuk apapun, mendapatkan skor nol pada aspek Pemilu Bersih dan Hak Pilih Inklusif serta, sebagai akibatnya, pada aspek Pemerintahan Perwakilan. Meskipun Libya dan Sudan Selatan menyelenggarakan pemilu, masing-masing pada 2014 dan 2010, tetapi pemilu reguler tak diselenggarakan di kedua negara ini karena perang saudara berkepanjangan. Di negara-negara Afrika Barat seperti Liberia dan Sierra Leone, pemilu yang demokratis dan pemerintahan yang lebih kuat telah menggantikan perang saudara yang telah berlangsung lama.
- Dari negara-negara demokrasi gelombang ketiga yang baru, Tunisia telah menyaksikan kemajuan paling demokratis dan sekarang skornya berada di antara 25 persen teratas di dunia pada tujuh subatribut demokrasi. Gambia adalah negara demokrasi gelombang ketiga lainnya yang telah menunjukkan kemajuan demokrasi signifikan sejak transisinya menuju demokrasi pada 2017.



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Ketika demokrasi menjadi tipe rezim yang paling lazim di wilayah ini, sebanyak 11 negara Afrika masih dikategorikan sebagai non-demokrasi, mewakili 22 persen negara di wilayah ini.
- Afrika juga memiliki porsi terbesar dari rezim hibrida di dunia, dengan lebih dari sepertiga negara (18) masuk kategori ini. Negara terakhir yang teregresi menjadi rezim hibrida adalah Tanzania, pada 2018.
- Meskipun mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, penyelenggaraan pemilu di sejumlah negara Afrika tetap saja cacat. Pada saat wilayah ini menyaksikan munculnya sejumlah transisi dari partai penguasa menjadi oposisi, banyak negara gagal memberlakukan reformasi utama yang akan memajukan integritas proses elektoral. Sengketa pemilu menjadi hal yang lazim dari proses pemilu di wilayah ini, kadang-kadang mengarah pada pecahnya kekerasan terkait pemilu.
- Serangkaian tantangan lain berkenaan konsolidasi demokrasi terlihat di banyak bagian Afrika saat ini terkait dengan konflik dan perang saudara. Di beberapa negara, capaian-capaian sebelumnya kembali mundur karena kekerasan, kembali

ke pemerintahan militer, atau kegagalan mentransformasi proses politik.

- Sejumlah tantangan menghambat implementasi inisiatif inisiatif tingkat regional maupun tingkat negara di Afrika terkait Kesetaraan Gender. Pada tingkat yang berbeda-beda, perempuan di Afrika kekurangan akses yang setara pada kekuasaan politik dan status sosial ekonomi, serta pelibatan mereka tetap menjadi rintangan utama bagi sebagian besar negara.
- Meskipun ada perluasan demokrasi di wilayah ini, beberapa negara telah mengalami penurunan demokrasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini. Penurunan seperti itu terlihat di negara-negara seperti Mesir yang, setelah Musim Semi Arab (Arab Spring), mengalami penurunan demokrasi yang lebih jauh dan otokratisasi yang kian mendalam.
- Kemandirian Yudisial merupakan salah satu aspek demokrasi terlemah di Afrika. Tingkat Kemandirian Yudisial rendah di hampir separuh negara di wilayah ini.
- Afrika adalah wilayah dengan tingkat korupsi tertinggi, sekaligus juga porsi tertinggi negara demokrasi dengan tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi yang tinggi sangat berhubungan dengan rendahnya tingkat Pembangunan Manusia. Hal ini, karenanya, memberi efek merugikan bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Temuan Regional: Timur Tengah



Perkembangan Positif

- Berdasarkan Indeks GSOD, Timur Tengah hanya memiliki dua negara demokrasi pada 2018: Irak yang dipandang sebagai negara demokrasi yang sangat lemah; dan Lebanon, yang merupakan negara demokrasi rapuh.
- Irak merupakan satu-satunya negara di Timur Tengah di mana demokrasi terbukti tangguh. Sekalipun lembaga demokrasinya tetap rapuh, Irak belum mundur menjadi rezim hibrida sejak transisinya ke demokrasi pada 2010. Negara ini adalah negara demokrasi yang sangat lemah, dengan tingkat Administrasi Imparsial dan Keterlibatan Partisipatif yang rendah, serta memiliki tingkat Hak Asasi Manusia yang berada di antara 25 persen terbawah negara-negara di dunia.
- Beberapa upaya telah dilakukan terkait Kesetaraan Gender di Timur Tengah. Banyak pekerjaan masih diperlukan, tetapi langkah kecil telah terlihat. Irak telah memperkenalkan kuota untuk perempuan di cabang kekuasaan legislatif. Arab

Saudi telah memberi kuota untuk pengangkatan perempuan di Dewan Shura (Dewan Konsultatif). Akan tetapi, hal ini dipandang lebih sebagai upaya menyenangkan mitra Barat ketimbang cerminan reformasi fundamental terkait kesetaraan gender.



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Musim Semi Arab pada 2010-2012 membangkitkan harapan bagi kemajuan demokrasi di Timur Tengah dan tampak menjadi titik balik dalam sejarah demokrasi di wilayah ini. Akan tetapi, banyak gerakan yang menuntut demokrasi yang lebih besar bagi Timur Tengah dan Afrika Utara telah gagal. Dengan pengecualian Tunisia di Afrika Utara, transisi menuju demokrasi yang diharapkan telah dibatalkan.
- Timur Tengah tetap wilayah yang paling tidak demokratis di dunia. Hal ini jelas terlihat dari jumlah negara demokrasi yang rendah (dua dari 12 negara di wilayah ini). Timur

Tengah juga wilayah dengan proporsi terbesar negara non-demokrasi. Lebih dari setengah negara-negara di Timur Tengah (58 persen) adalah negara non-demokrasi, sedangkan seperempatnya merupakan rezim hibrida.

- Negara-negara non-demokrasi di wilayah ini, sayangnya, juga terbukti tangguh. Dari 12 negara di wilayah ini, 10 di antaranya belum pernah mengalami demokrasi. Status rezim enam dari negara-negara itu tidak pernah berubah, sementara empat lainnya pernah mengalami periode rezim hibrida.

Temuan Regional: Amerika

Temuan Regional: Amerika Latin dan Karibia



Perkembangan Positif

- Amerika Latin dan Karibia adalah wilayah terdemokratis ketiga di dunia, setelah Amerika Utara dan Eropa, dengan semua, kecuali tiga negara, diklasifikasikan sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi di wilayah ini terbukti tangguh. Dari lima negara yang merupakan negara demokrasi pada 1977, empat (Kolombia, Kosta Rika, Jamaika, serta Trinidad dan Tobago), telah menjadi negara demokrasi tanpa terputus. Di antara 16 negara yang bertransisi ke demokrasi setelah 1977, hampir 75 persen tetap menjadi negara demokrasi tanpa gangguan.
- Amerika Latin dan Karibia memiliki lanskap demokrasi yang heterogen. Pada saat yang sama, sejumlah kecil negara demokrasi menonjol karena kinerjanya yang tinggi. Dari lima negara teratas di dunia dengan tingkat aspek Pemerintahan Perwakilan yang tinggi, tiga negara (Chile, Kosta Rika dan Uruguay) berada di Amerika Latin. Pada 2018, Trinidad dan Tobago, serta Uruguay merupakan dua negara di wilayah ini (dari 21 di dunia) yang memiliki skor tinggi di seluruh atribut demokrasi. Chile, Kosta Rika dan Jamaika mendapat skor tinggi pada empat dari lima atribut demokrasi. Kinerja demokrasi dari kelima negara ini juga tinggi dibandingkan negara lain di dunia—semuanya mendapat skor di antara 25 persen teratas di dunia pada aspek Pemerintahan Perwakilan, Hak Asasi Manusia, Pengawasan Pemerintahan, dan dengan pengecualian Jamaika, Administrasi yang Imparsial.
- Aspek kinerja terbaik negara demokrasi Amerika Latin dibandingkan dengan negara lainnya di dunia adalah Partisipasi Elektoral (di mana hasil pengukuran wilayah ini memiliki tingkat tertinggi di dunia, bersama dengan Asia dan Pasifik) dan Kebebasan Beragama (di mana ukuran wilayah ini lebih tinggi skornya daripada Eropa). Pada seluruh aspek demokrasi lainnya, Amerika Latin dan Karibia menjadi tiga terbaik, setelah Amerika Utara dan Eropa.
- Amerika Latin dan Karibia adalah wilayah yang paling maju dalam aspek Kesetaraan Gender bidang politik selama satu dekade terakhir. Bersama dengan Eropa, wilayah ini memiliki perwakilan perempuan tertinggi di parlemen, yakni rata-rata 27 persen, yang berada di atas rata-rata dunia 24 persen.

- Kualitas demokrasi Amerika Latin sangat bervariasi: 12 pola kinerja demokrasi yang berbeda dapat teridentifikasi. Pola kinerja demokrasi yang paling lazim adalah (a) rentang menengah pada empat dari lima atribut demokrasi, dan (b) kinerja rendah pada paling sedikit satu atribut demokrasi.



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Kuba adalah satu-satunya negara di wilayah ini yang tidak mengalami transisi demokrasi sejak 1975 dan bertahan sebagai rezim non-demokrasi selama empat dekade terakhir. Peran Kuba dalam kegagalan demokrasi Venezuela tidak boleh diremehkan. Venezuela telah memasok minyak ke Kuba dengan imbalan dokter, guru dan penasihat intelijen Kuba.
- Venezuela adalah negara yang paling buruk secara demokrasi di wilayah ini. Venezuela telah mengalami proses kemunduran demokrasi yang parah selama dua dekade terakhir, yang berakibat pada kegagalan demokrasi sepenuhnya di 2017. Pada kenyataannya, Venezuela merupakan satu-satunya negara di dunia yang telah berubah dari negara demokrasi dengan tingkat Pemerintahan Perwakilan yang tinggi (dari 1975 hingga 1996) menjadi non-demokrasi.
- Sejumlah negara lain menderita kemunduran atau erosi demokrasi (atau keduanya). Nikaragua telah mengalami kemunduran demokrasi yang parah beberapa tahun belakangan ini, yakni mudur ke kategori rezim hibrida pada 2016. Brazil telah mengalami erosi demokrasi selama lima tahun terakhir. Brazil adalah negara demokrasi di wilayah ini dengan penurunan pada sebagian besar subatribut (8 dari 16) dan berada di antara lima negara teratas di dunia dengan jumlah penurunan terbesar sejak 2013. Sejak 2013, Argentina, Chile, Kosta Rika, Republik Dominika, El Salvador, dan Haiti telah mengalami penurunan pada paling sedikit satu subatribut demokrasi.
- Beberapa negara di wilayah ini dicirikan dengan kerapuhan demokrasi. Dari 16 negara yang bertransisi ke demokrasi setelah 1977, lima di antaranya telah mengalami gangguan, sehingga mundur menjadi rezim hibrida. Namun empat (Republik Dominika, Haiti, Honduras dan Peru) sudah kembali

ke demokrasi.. Republik Dominika, Haiti dan Honduras juga merupakan negara demokrasi terlemah di wilayah itu, bersama Guatemala, yakni dinilai dari kinerja mereka yang rendah pada satu atau lebih atribut demokrasi.

- Kawasan ini menderita tingkat ketimpangan sosial-ekonomi yang tertinggi di dunia, yang telah diterjemahkan menjadi akses yang sangat tidak setara ke kekuasaan politik. Hal ini juga berakibat pada Amerika Latin dan Karibia memiliki angka kejahatan dan kekerasan tertinggi di dunia. Digabungkan dengan tingkat korupsi yang tinggi, hal ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi dan memicu ketidakpuasan sipil.
- Partai politik di Amerika Latin menderita krisis perwakilan. Krisis ini berasal dari kesulitan partai politik beradaptasi dengan transformasi sosial dan meningkatnya ekspektasi penduduk kelas menengah yang terperdaya oleh kurangnya hasil dalam mengurangi korupsi dan kesenjangan. Hal ini telah mendorong pemilih di beberapa negara menjauh dari partai tradisional menuju ke para pimpinan yang anti kemapanan.
- Sama dengan kawasan lainnya di dunia, Amerika Latin dan Karibia juga mengalami penyusutan ruang sipil dan media tahun-tahun belakangan ini. Pembatasan ruang sipil seringkali, tetapi tidak selalu, dikaitkan dengan advokasi atau investigasi terhadap korupsi dan jejaring ilegal.
- Wilayah ini juga menghadapi tantangan-tantangan baru, termasuk migrasi. Hal ini didorong, sebagian, oleh kehancuran demokrasi di Venezuela dan Nikaragua, serta perbatasan yang lebih kurang terbuka antara Meksiko dan Amerika Serikat yang mengalihkan aliran migrasi dari Amerika Tengah ke seluruh wilayah tersebut.
- Terdapat penurunan yang nyata dalam dukungan terhadap demokrasi di seluruh wilayah. Survei pendapat publik menunjukkan adanya 12 poin penurunan dukungan terhadap demokrasi selama satu dekade terakhir, yakni dari 70 persen pada 2008 menjadi 58 persen pada 2017, dengan hampir sembilan poin penurunan terjadi pada tiga tahun terakhir saja (Latinobarómetro 2018).

Temuan Regional: Amerika Utara



Perkembangan Positif

- Amerika Utara memiliki tingkat Pemilu Bersih yang tinggi. Wilayah ini mendapat skor pada pengukuran ini 0,86, dengan Kanada dan Amerika Serikat mendapat skor pada 25 persen teratas di dunia. Sementara itu, skor Pemilu Bersih Amerika Serikat menurun dari 0,95 pada 2012 menjadi 0,78 pada 2018, hal ini meningkat pada 2017–2018, setelah pemilu sela.
- Baik Kanada maupun Amerika Serikat memiliki tingkat Hak Pilih Inklusif yang tinggi. Skor Kanada lebih tinggi (0,95) dan berada di antara 25 persen teratas negara di dunia, sedangkan skor Amerika Serikat 0,90.
- Amerika Utara memiliki tingkat Akses ke Keadilan dan Kebebasan Sipil yang tinggi. Baik Kanada dan Amerika Serikat berada di 25 persen teratas di kedua dimensi ini.
- Baik Kanada dan Amerika Serikat berkinerja di 25 persen teratas dunia dalam aspek Kesetaraan Gender. Kesetaraan Gender tinggi di Kanada (0,81) tetapi turun dari tinggi ke kisaran menengah di Amerika Serikat pada 2017 (0,69).
- Penegakan hukum yang dapat diperkirakan tinggi di Amerika Utara. Baik Kanada maupun Amerika Serikat memiliki skor di 25 persen teratas negara-negara di dunia pada ukuran ini. Kanada telah mengalami penurunan dalam skor ini sejak 2012, tetapi masih berkinerja di kisaran tinggi.

- Partisipasi Masyarakat Sipil di wilayah ini tinggi. Baik skor Kanada maupun Amerika Serikat berada di 25 persen teratas negara-negara di dunia pada ukuran ini. Sekalipun Kanada telah mengalami sedikit peningkatan dalam skor Partisipasi Masyarakat Sipilnya sejak 2013, dari 0,74 ke 0,84, peningkatan ini tidak signifikan secara statistik..



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Amerika Utara memiliki kinerja kisaran menengah pada Kesetaraan Kelompok Sosial dan Parlemen yang Efektif. Pada Kesetaraan Kelompok Sosial, skor Kanada 0,65 dan Amerika Serikat 0,53. Pada Parlemen yang Efektif, Kanada terus berada di 25 persen teratas seluruh negara, sedangkan Amerika Serikat kembali masuk di jajaran di 25 persen teratas di dunia, setelah turun pada tahun 2017. Akan tetapi, dalam lima tahun terakhir Amerika Serikat telah mengalami penurunan yang signifikan secara statistik pada ukuran ini, dari 0,84 di tahun 2012 menjadi 0,71 di tahun 2018.
- Integritas Media juga tinggi di wilayah ini, tetapi telah terlihat sedikit penurunan. Amerika Serikat khususnya mengalami penurunan yang signifikan pada skornya di Integritas Media antara 2012 dan 2017, meskipun skornya masih di kisaran tinggi (0,76).
- Kendati korupsi tetap rendah di Amerika Utara, tetapi baik di Kanada maupun Amerika Serikat telah terlihat penurunan

yang secara statistik signifikan pada skor Ketidadaan Korupsi. Skor Kanada jatuh dari 0,87 pada 2012 ke 0,79 pada 2018 yang masih tinggi, sedangkan skor Amerika Serikat jatuh dari 0,83 di tahun 2012 ke kisaran menengah (0,69) di tahun 2018. Akan tetapi, pada saat yang sama, kedua negara itu masih berada di atas rata-rata dunia.

- Pada Partisipasi Elektoral, skor Amerika Utara sangat buruk, dan dikalahkan oleh hampir semua wilayah di dunia, kecuali Afrika dan Timur Tengah. Skor Amerika Serikat (0,47) pada Partisipasi Elektoral, menyeret turun rata-rata regional (0,54) dan berada di antara yang terendah di antara negara demokrasi dunia. Tingkat Partisipasi Elektoral biasanya lebih tinggi dalam pemilu presiden (rata-rata 56,6% sejak 1975) ketimbang pada pemilu sela (rata-rata 36,9% hingga 2018). Tingkat partisipasi pemilih yang terus menurun di Amerika Serikat berkontribusi terhadap pelemahan demokrasi di negara itu karena rendahnya partisipasi pemilih merusak prinsip utama kontrol rakyat.
- Amerika Serikat juga mengalami penurunan dalam Kebebasan Sipil. Pada ukuran ini, skor Amerika Serikat jatuh dari 0,98 di tahun 2012 hingga 0,87 di 2018 yang masih tergolong tinggi. Dalam aspek Kebebasan Sipil, penurunan yang paling besar terjadi dalam subaspek Kebebasan Berekspresi,

meskipun penurunan juga tercatat di Kebebasan Bergerak dan Kebebasan Beragama.

- Di Amerika Serikat, kombinasi sejumlah faktor berkontribusi pada sistem elektoral di mana pemilih biasa Amerika, terutama pemilih miskin dan minoritas, semakin berjuang untuk mengakses dan berpartisipasi secara setara. Masalah-masalah seperti gerrymandering (manipulasi batas daerah pemilihan untuk kepentingan kelompok atau partai tertentu), peraturan dana kampanye yang lemah, sistem “electoral college” dan aturan kartu pemilih yang ketat (dan, yang paling mutakhir, campur tangan asing dalam pemilu) berkontribusi dalam sistem pemilu yang lemah dalam inklusifitas, dan di mana kekayaan dan akses ke kekuasaan merusak kesetaraan politik.
- Sementara skor Kanada tinggi pada Demokrasi Lokal, pada 2018 Amerika Serikat jatuh dari 25 persen teratas skor dunia untuk ukuran ini. Kanada berada dalam 25 persen teratas dunia untuk indikator ini, tetapi Amerika Serikat telah mengalami penurunan selama lima tahun terakhir, dari 0,95 di 2013 menjadi 0,69 di 2018. Skornya sekarang berada di kisaran pertengahan pada ukuran ini.

Temuan Regional: Asia dan Pasifik



Perkembangan Positif

- Asia dan Pasifik mengalami perluasan demokrasi secara signifikan dalam empat dekade terakhir. Jumlah negara demokrasi telah bertambah dua kali lipat (dari 7 ke 15) dan terdapat pengurangan negara non-demokrasi (dari 14 ke 10). Perluasan ini telah didorong oleh transisi demokrasi, dengan 12 negara menjadi demokrasi untuk pertama kalinya sejak 1975. Dua di antara negara ini (Malaysia dan Myanmar) melakukan transisi demokrasi dalam empat tahun terakhir. Sri Lanka, salah satu dari 5 negara demokrasi sebelum 1975 di wilayah ini, bertransisi kembali ke demokrasi pada 2015, setelah jeda rezim hibrida yang kedua.
- Malaysia, salah satu dari dua rezim hibrida yang paling bertahan di wilayah ini (bersama dengan Singapura), bertransisi ke demokrasi untuk pertama kalinya setelah Pemilu 2018, mengakhiri 60 tahun monopoli kekuasaan dari partai yang berkuasa.
- Negara-negara demokrasi yang lebih tua di Asia dan Pasifik terbukti tangguh. Dari tujuh negara demokrasi yang ada pada 1975, lima tetap tak terganggu hingga sekarang: Australia, India, Jepang, Selandia Baru dan Papua Niugini.

Dari 12 negara yang menjadi demokrasi setelah 1975, hampir semua kecuali dua negara, tetap menjadi demokrasi, dan setengahnya belum mengalami interupsi tidak demokratis.

- Dari seluruh negara demokrasi awal gelombang ketiga (yakni yang bertransisi antara 1975 dan 2000) Republik Korea (Korea Selatan) dan Taiwan telah mengalami kemajuan yang paling demokratis. Dari negara demokrasi yang lebih baru, Timor-Leste capaian-capaian demokrasinya menonjol. Ini adalah negara-negara demokrasi gelombang ketiga yang memiliki tingkat Pemerintahan Perwakilan yang tinggi.
- Negara demokrasi di wilayah ini memiliki banyak bentuk dan format. Hanya Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Taiwan memiliki kinerja tinggi di seluruh lima atribut demokrasinya, diikuti dengan Jepang yang berkinerja tinggi di empat atribut. Kinerja yang paling lazim (40 persen negara demokrasi di wilayah ini) berada di kisaran menengah di seluruh atribut.



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Separuh dari negara-negara di Asia dan Pasifik tidak memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Beberapa

negara di wilayah ini telah menderita akibat semakin dalamnya otokratisasi beberapa tahun terakhir. Misalnya, Kamboja yang tidak pernah sepenuhnya bertransisi ke demokrasi, akhirnya menjadi rezim non-demokrasi pada 2018. Setelah Timur Tengah dan Afrika, Asia menjadi rumah bagi sebagian besar negara yang belum pernah sama sekali mengalami demokrasi dalam sejarah mereka (40 persen negara di wilayah ini).

- Negara demokrasi di Asia dan Pasifik mengalami kerapuhan demokrasi dan kinerja demokrasi yang lemah. Nepal, Filipina dan Sri Lanka telah mengalami interupsi tidak demokratis sejak transisinya menuju demokrasi. Negara lainnya, seperti Malaysia, Myanmar dan Papua Niugini, menunjukkan kinerja yang rendah pada paling sedikit satu atribut demokrasinya. Negara lainnya juga mengalami pengikisan demokrasi.
- Asia dan Pasifik merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak oleh erosi demokrasi, dengan lebih dari setengah negara demokrasinya menderita karenanya. India saat ini mengalami kemunduran demokrasi dan mengalami penurunan tertinggi dalam jumlah subatribut demokrasi sejak 2013. Filipina, juga negara yang mengalami kemunduran demokrasi, mengikuti India dalam jumlah penurunan demokrasi. Negara demokrasi yang lebih tua, seperti Australia, Jepang, Selandia Baru mengalami sedikit pengikisan demokrasi, sebagaimana telah dialami Indonesia, Mongolia dan Timor-Leste.
- Beberapa negara di wilayah ini telah mengalami kerapuhan demokrasi, dengan kegagalan demokrasi sejak transisi pertama mereka menuju demokrasi. Bangladesh (sejak 2014) dan Pakistan (sejak 2018) telah teregresi ke rezim hibrida. Thailand mundur kembali ke penguasaan militer pada 2014, meskipun pemilu 2019 telah membuka jalan bagi pemerintahan sipil.
- Sejumlah negara Asia menderita karena lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan baik oleh aktor-aktor negara maupun aktor non-negara. Pelanggaran ini kadang-kadang dihubungkan dengan konflik internal yang makin diperburuk dengan gelombang etno-nasionalisme yang muncul kembali.
- Meskipun ada kemajuan dalam Kesetaraan Gender di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan di Asia dan Pasifik belum sejalan dengan negara-negara lain di dunia. Tantangan yang signifikan tetap ada untuk mencapai Kesetaraan Gender dan TPB (tujuan pembangunan berkelanjutan/SDG) 5.5 tentang keterwakilan politik perempuan. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tidak hanya di negara-negara demokrasi baru, tetapi juga di negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan.
- Serangan baru-baru ini terhadap lembaga-lembaga yang penting bagi integritas dan berfungsinya demokrasi memberi tantangan signifikan terhadap demokrasi di Asia dan Pasifik. Lembaga-lembaga yang terancam meliputi peradilan, sistem pengadilan, komisi pemilihan umum, parlemen, dan lembaga pemberantas korupsi.
- Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi korupsi (TPB 16.5), hampir separuh dari seluruh negara di Asia dan Pasifik masih mengalami tingginya tingkat korupsi. Situasi ini diperparah oleh sistem yudisial yang lemah yang tidak memiliki kapasitas untuk memerangi korupsi.
- Muncul berbagai upaya di seluruh kawasan untuk merusak ruang sipil, kebebasan berbicara dan media yang bebas beberapa tahun terakhir. Di Kamboja, misalnya, menyempitnya ruang sipil terjadi dalam konteks mendalamnya otokratisasi, sedangkan di Thailand penyempitan yang serupa terjadi setelah kegagalan demokrasi pada 2014. Di negara-negara lain, hal ini telah terjadi dalam konteks erosi dan kemunduran demokrasi, terjelaskan dengan kebangkitan partai politik nasionalis, dan dijustifikasi dengan alasan kedaulatan nasional, hukum dan ketertiban, keamanan nasional, dan respons terhadap terorisme.
- Target TPB 16 yang paling memprihatinkan adalah TPB 16.10, dengan lebih banyak negara yang mengalami penurunan ketimbang negara yang mengalami kemajuan dalam Integritas Media dan Kebebasan Berserikat dan Berkumpul sejak 2015.

Temuan Regional: Eropa



Perkembangan Positif

- Setelah Amerika Utara, Eropa adalah wilayah kedua yang paling demokratis di dunia dengan 93 persen negara diklasifikasikan sebagai negara demokrasi. Eropa memiliki proporsi terbesar dari negara demokrasi di dunia, dengan 39 negara diklasifikasikan sebagai negara demokrasi, yang merupakan 40 persen dari negara demokrasi di dunia.
- Porsi terbesar dari negara demokrasi gelombang ketiga dapat ditemukan di Eropa. Sejak 1975, sebanyak 28 negara di wilayah ini telah bertransisi ke demokrasi, di mana hampir setengahnya (12) adalah negara-negara baru yang mendapatkan kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet/blok komunis. Negara-negara demokrasi Eropa telah terbukti sangat tangguh. Sementara dua negara demokrasi gelombang ketiga (Albania dan Georgia) mundur menjadi rezim hibrida untuk beberapa waktu, sejak mereka kembali ke demokrasi.
- Dari 21 negara demokrasi di dunia dengan skor tinggi pada kelima atribut GSoD, 14 berada di Eropa. Yang mayoritas (11) adalah negara demokrasi di Eropa Utara dan Eropa Barat, sedangkan satu berada di Eropa Selatan (Spanyol) dan dua lainnya (Estonia dan Slovenia) berada di Eropa Tengah-Timur.
- Di negara-negara seperti Denmark, Finlandia, Latvia dan Inggris, bertambahnya jumlah inisiatif memberikan peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan publik, termasuk inisiatif warga negara pada tingkat lokal, e-petisi atau e-platform.
- Armenia adalah satu-satunya negara di Eropa yang bertransisi dari rezim hibrida pada 2017 menjadi demokrasi pada 2018. Armenia juga mencatatkan angka tertinggi kemajuan-kemajuan yang secara statistik signifikan di Eropa selama 2018: pada Pengawasan Pemerintah, Administrasi yang Imparsial, dan Ketertiban Partisipatif, serta pada delapan subatribut demokrasi yang terkait.



Tantangan Terhadap Demokrasi

- Meskipun konsentrasi terbesar negara-negara demokrasi berada di Eropa, tetapi wilayah ini menurun kualitas demokrasinya selama 10 tahun terakhir. Porsi negara yang memiliki skor tinggi pada tingkat Pengawasan Pemerintahan, Kebebasan Sipil, Integritas Media dan Masyarakat Sipil telah menurun. Karena itu, kebanyakan penurunan demokrasi di Eropa terkait dengan melemahnya Pengawasan Pemerintahan dan menyempitnya ruang sipil, dan sedang terjadi dalam konteks erosi demokrasi dan kemunduran demokrasi.
- Lebih dari separuh (56 persen) negara demokrasi di Eropa mengalami pengikisan demokrasi. Dan dari 10 negara demokrasi di dunia yang saat ini mengalami kemunduran demokrasi, enam negara—Hungaria, Polandia, Rumania, Serbia, Turki dan, pada tataran yang lebih rendah, Ukraina—berada di Eropa.
- Terdapat kelesuan umum dalam partai-partai politik arus utama di hampir seluruh Eropa dan khususnya di negara-negara Eropa Barat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan partai-partai non-tradisional, seperti partai-partai populis, ekstrimis, dan anti-kemapanan. Kemunduran demokrasi seringkali terkait dengan jenis-jenis partai yang disebutkan sebelumnya itu, mendapatkan akses ke pemerintahan. Fenomena partai politik penguasa menunjukkan tendensi otokrasi dapat dilihat di beberapa negara di wilayah ini, khususnya di Eropa Tengah dan Timur.
- Eropa saat ini telah mengalami gelombang populis. Akarnya dapat ditelusuri kembali pada beberapa faktor yang bersilangan, termasuk globalisasi ekonomi dan budaya, yang telah mentransformasi struktur sosial dan budaya politik di banyak negara di wilayah ini. Faktor politik pendorong populisme mencakup berkurangnya kepercayaan pada partai politik dan krisis perwakilan, juga fragmentasi dan polarisasi ruang publik yang diperdalam lebih lanjut oleh munculnya teknologi baru dan media sosial. Faktor sosial-ekonomi pendorong populisme meliputi transformasi pasar tenaga kerja, peningkatan disparitas sosial-ekonomi dalam negeri serta adanya jurang antara ekspektasi warga negara mengenai apa yang dapat diberikan oleh demokrasi, dengan kekecewaan terhadap demokrasi yang dianggap gagal memberikan kesejahteraan bagi semua.

Bab 4

Pertimbangan Kebijakan

Pertimbangan kebijakan berikut disusun atas dasar kepakaran International IDEA di tingkat global, regional, dan negara berdasarkan pada pengalaman kelembagaan yang terakumulasi selama hampir 25 tahun dalam memberikan nasihat dan menganalisis reformasi demokrasi di seluruh dunia.

- **Membela dan menjaga demokrasi.** Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga-lembaga politik (termasuk parlemen dan partai politik) dan penyedia bantuan demokrasi dan donor perlu berargumentasi akan pentingnya demokrasi dan melindunginya dari ancaman. Dalam membela demokrasi, aktor-aktor ini harus jujur dan spesifik tentang kekurangan dari sistem yang ada, sangat seksama dalam menggambarkan masalah yang sekarang dihadapi lembaga-lembaga demokrasi, dan mengkaji solusi yang konstruktif mengenai bagaimana mengatasinya.
- **Meningkatkan integritas dan transparansi lembaga-lembaga politik.** Pemerintah, masyarakat sipil dan penyedia bantuan demokrasi harus meningkatkan integritas lembaga-lembaga politik dengan memberantas korupsi, meningkatkan transparansi, dan menerapkan kebijakan-kebijakan efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- **Meningkatkan transparansi keuangan politik.** Sedapat mungkin, kembangkan pendekatan antikorupsi yang holistik dan komprehensif yang mengaitkan pendanaan politik dengan hal-hal terkait seperti pengungkapan aset dan daftar lobi. Instrumen internasional seperti rekomendasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi serta inisiatif Kemitraan Pemerintahan Terbuka dapat mendukung upaya reformasi antikorupsi negara ke arah itu.
- **Membela dan menjaga demokrasi.** Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga-lembaga politik (termasuk parlemen dan partai politik) dan penyedia bantuan demokrasi dan donor perlu berargumentasi akan pentingnya demokrasi dan melindunginya dari ancaman. Dalam membela demokrasi, aktor-aktor ini harus jujur dan spesifik tentang kekurangan dari sistem yang ada, sangat seksama dalam menggambarkan masalah yang sekarang dihadapi lembaga-lembaga demokrasi, dan mengkaji solusi yang konstruktif mengenai bagaimana mengatasinya.
- **Menjadi kreatif dan serius tentang partisipasi politik.** Pemerintah, partai politik, dan parlemen harus menggunakan mekanisme partisipatif yang jauh lebih luas untuk memperdalam praktik demokrasi di luar pemilu.
- **Memastikan mekanisme perwakilan inklusif.** Pemerintah dan lembaga politik dengan dukungan penyedia bantuan demokrasi, harus membuat mekanisme perwakilan yang lebih inklusif. Mereka harus terus berinvestasi dalam pelibatan perempuan dan pemuda sambil memperluas upaya melibatkan kelompok-kelompok termarjinalkan lainnya, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).
- **Memperkuat lembaga pemeriksa eksekutif, termasuk legislatif, juga pengadilan, serta sistem media yang pluralis dan independen.** Lembaga-lembaga ini memungkinkan warga negara, yang berhadapan dengan pembatasan hak-hak, untuk menggunakan dan melindungi kebebasan politik mereka. Pemeriksaan yang lebih kuat terhadap pemerintahan dapat membatasi ruang lingkup bagi perubahan kebijakan yang cepat dan berjangkauan jauh yang kadang-kadang diperlukan. Namun, mereka memastikan pemerintahan petahana menjangkau aktor politik lain dan membangun koalisi inklusif yang cenderung membuat perubahan kebijakan lebih berkelanjutan.
- **Melindungi lembaga-lembaga demokrasi baru dari kekecewaan rakyat yang kemungkinan akan terjadi jika harapan tinggi yang melekat pada lembaga itu tidak terpenuhi.** Untuk mengelola harapan rakyat dengan lebih baik, pembuat kebijakan harus terlibat dalam dialog rasional dan terbuka dengan warga negara yang menumbuhkan pemahaman tentang hambatan dan pertukaran politik demokrasi. Peningkatan pengetahuan rakyat mengenai kebijakan-kebijakan juga akan memungkinkan warga negara membuat penilaian yang lebih terinformasi terkait janji-janji pemilu dan kelayakannya. Ingatan mengenai otoritarian di masa lalu harus dijaga dan disampaikan untuk mengingatkan generasi yang lebih muda akan pencapaian demokrasi, oleh karena itu menjaga dari sentimen nostalgia yang menyedihkan.

- **Pemerintah harus melindungi warga negaranya dari dampak buruk krisis ekonomi dan globalisasi.** Hal ini memerlukan kebijakan yang memungkinkan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk imigran, untuk beradaptasi dengan kehilangan pekerjaan dan menyediakan bagi mereka akses yang adil ke layanan, pekerjaan, peluang dan sumber daya.
- **Kebijakan-kebijakan diarahkan untuk mengatasi polarisasi sosial.** Elite politik moderat harus menunjukkan kesiapan mereka mendengarkan keprihatinan warga negara dan menjembatani perpecahan politik dengan mengintegrasikan komponen masyarakat yang berbeda. Menanggapi keprihatinan ini dengan serius akan mengurangi ruang gerak penantang populis yang mengeksploitasi keluhan terhadap elite politik mapan.
- **Berinvestasi dalam pendidikan kewarganegaraan tentang demokrasi dan literasi media digital.** Pemerintah dan penyedia bantuan demokrasi harus berinvestasi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk memajukan nilai-nilai demokrasi, melengkapi warga negara di segala usia dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersentuhan dengan informasi secara kritis sambil tetap menghormati perbedaan-perbedaan.
- **Mendukung penguatan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia dalam konteks di mana hal-hal ini terancam.** Memfasilitasi akses ke jaringan masyarakat sipil regional dan internasional bagi organisasi masyarakat sipil yang menghadapi serangan balik, terutama yang bekerja di bidang terkait isu pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia, serta bagi organisasi yang lebih lemah dan kurang sumber dayanya, yang biasanya cenderung bekerja pada isu-isu hak perempuan dan LGBT.
- **Mendukung media yang bebas, beragam dan kritis.** Keanekaragaman perspektif media dan keberadaan jurnalisme investigatif yang kuat, yang bebas dari ancaman, yang dapat memberikan laporan yang kritis dan seimbang, serta menyelidiki kekuasaan pemerintah, merupakan kunci menuju demokrasi yang sehat. Fasilitasi akses data dan informasi untuk jurnalis seperti itu, guna memperkuat basis bukti dan sumber data mereka.
- **Mempertimbangkan dengan cermat pengenalan teknologi.** Pengenalan teknologi dalam proses elektoral harus ditambahkan dalam diskusi yang bijak dan sadar-konteks, serta analisis manfaat dan risiko pada pilihan-pilihan yang tersedia. Ketika kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi dan pemilu sudah mulai tergerus, pengenalan teknologi bisa jadi kontroversial. Jika pengenalan teknologi dalam pemilu didasarkan pada keputusan yang diinformasikan dengan baik dan dikelola dengan baik, teknologi berpotensi berkontribusi pada pemecahan masalah kepemiluan yang sudah berlangsung lama.
- **Melindungi capaian-capaian demokrasi dari berbagai risiko.** Kepercayaan dalam proses dan lembaga elektoral dapat hilang dengan mudah. Ketika hal itu terjadi, kepercayaan sulit dipulihkan kembali. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pemilu harus menginstitusionalisasikan manajemen risiko dan pembangunan data tahan. Manajemen risiko akan membantu mereka mengantisipasi dan mengatasi berbagai risiko sebelum hal tersebut berdampak negatif pada proses dan hasil. Pembangunan ketahanan akan memperkuat kapasitas sistem untuk menghadapi guncangan dan tekanan yang tidak terhindarkan.

Referensi terpilih

- Acemoglu, D., et al., 'Democracy does cause growth' [Demokrasi memang menyebabkan pertumbuhan], *Journal of Political Economy*, 127/1 (2019), hal. 47–100, <<https://doi.org/10.1086/700936>>
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *Assessing the Quality of Democracy: A Practical Guide* [Menilai Kualitas Demokrasi: Sebuah Panduan Praktis] (Stockholm: International IDEA, 2008), <<http://www.idea.int/publications/catalogue/assessing-quality-democracy-practical-guide>>, diakses 7 Juli 2019
- , *The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience* [Global State of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi] (Stockholm: International IDEA, 2017a), <<https://www.idea.int/gsod-2017>>, diakses 7 Juli 2019
- , 'Geographic definitions of regions in The Global State of Democracy' [Definisi Geografis Wilayah dalam Global State of Democracy], Background Paper, 2017b, <<https://www.idea.int/gsod/files/IDEA-GSOD-2017-BACKGROUND-PAPER-REGIONS.pdf>>, diakses 7 Juli 2019
- , *International IDEA Strategy 2018–22* [Strategi International IDEA 2018–22] (Stockholm: International IDEA, 2018a), <<https://www.idea.int/about-us/mission-values>>, diakses 7 Agustus 2019
- , *The Global State of Democracy Indices Methodology: Conceptualization and Measurement Framework* [Metodologi Indeks Global State of Democracy: Kerangka Konseptualisasi dan Pengukuran] (Stockholm: International IDEA, 2018b), <<https://doi.org/10.31752/idea.2018.66>>
- , *The Global State of Democracy Indices, 1975–2018* [Indeks Global State of Democracy, 1975–2018] (2019a), <<http://www.idea.int/gsod-indices>>, diakses 3 September 2019
- , 'Political Gender Equality and the Global State of Democracy Indices' [Kesetaraan Gender Politik dan Indeks Global State of Democracy]. *GSoD In Focus* No. 6, Maret 2019b, <<https://doi.org/10.31752/idea.2019.8>>
- Latinobarómetro, *Informe Latinobarómetro 2018* [Latinobarómetro Report 2018] (Santiago de Chile: Latinobarómetro, 2018), <<http://www.latinobarometro.org>>, diakses 29 Juli 2019
- Munck, G. L., 'What is democracy? A reconceptualization of the quality of democracy' [Apakah demokrasi itu? Sebuah rekonseptualisasi kualitas demokrasi] *Democratization*, 23/1 (2016), pp. 1–26, <<https://doi.org/10.1080/13510347.2014.918104>>
- United Nations Development Programme, *Human Development Index, 2018* [Indeks Pembangunan Manusia 2018] (gambar mengacu pada 2017), <<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>>, diakses 9 Agustus 2019
- United Nations General Assembly, 'The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet' [Jalan menuju martabat pada 2030: mengakhiri kemiskinan, mentransformasi seluruh kehidupan dan melindungi planet], UN Document A/RES/70/1, 4 Desember 2014, <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&Lang=E>, diakses 15 Februari 2019
- , 'Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development' [Mentransformasi dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan], UN Document A/RES/70/1, 21 Oktober 2015, <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E>, diakses 24 Oktober 2018
- Varieties of Democracy (V-Dem), *Democracy Facing Global Challenges: V-Dem Annual Democracy Report 2019* [Demokrasi Menghadapi Tantangan Global: Laporan Demokrasi Tahunan V-Dem 2019] (Gothenburg: Varieties of Democracy Institute, 2019), <<https://www.v-dem.net/en/news-publications/democracy-reports/>>, diakses 7 Agustus 2019
- Wendling, Z. A. et al., 2018 *Environmental Performance Index* [Indeks Kinerja Lingkungan] (New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law and Policy, 2018), <<https://epi.envirocenter.yale.edu/>>, diakses 7 Agustus 2019
- World Bank, *World Development Indicators* [Indikator Pembangunan Dunia], 2018a, <<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>>, diakses 6 Agustus 2019
- , *Ease of Doing Business Score* [Nilai Kemudahan Melakukan Usaha], 2018b, <<https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score>>, diakses 6 Agustus 2019

Tentang International IDEA

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) merupakan organisasi antarpemerintahan yang mendukung lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi yang berkelanjutan di seluruh dunia. International IDEA bertindak sebagai katalisator untuk pembangunan demokrasi dengan memberikan sumber daya pengetahuan dan usulan-usulan kebijakan, dan mendukung reformasi demokrasi sebagai respons atas permintaan negara tertentu. International IDEA bekerja dengan pembuat kebijakan, pemerintah, organisasi internasional dan badan-badan, juga organisasi-organisasi regional yang terlibat dalam bidang pembangunan demokrasi.

Apa yang dilakukan oleh International IDEA?

Pekerjaan institut diorganisasikan pada tingkat global, regional dan negara, dengan fokus pada warga negara sebagai penggerak perubahan. International IDEA menghasilkan pengetahuan yang komparatif dalam bidang keahlian utamanya: proses elektoral, pembangunan konstitusi, serta partisipasi politik dan perwakilan, juga demokrasi ketika dihubungkan dengan gender, keberagaman, serta konflik dan keamanan.

International IDEA membawa pengetahuan ini pada perwakilan nasional dan lokal yang bekerja untuk reformasi demokrasi, dan memfasilitasi dialog untuk mendukung perubahan demokrasi.

Di mana International IDEA bekerja?

International IDEA bekerja di seluruh dunia. Bermarkas di Stockholm, Swedia. Institut memiliki kantor di Afrika, Asia-Pasifik, Eropa serta Amerika Latin dan Karibia.

International IDEA adalah Pemantau Tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

<<http://www.idea.int>>

Demokrasi Sedang Terancam dan Janjinya Perlu Dipulihkan Kembali

Nilai, kelayakan, dan masa depan demokrasi menjadi lebih dipertentangkan sekarang daripada sebelumnya dalam sejarah modern, atau setidaknya sejak tahun 1930-an. Di saat empat dasawarsa terakhir demokrasi meluas secara luar biasa di seluruh wilayah dunia, beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan tatanan di negara demokrasi, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tatkala gagasan negara demokrasi terus memobilisasi rakyat di seluruh dunia, praktik di negara demokrasi menimbulkan kekecewaan dan menyentak pemahaman banyak warga negara dan pendukung demokrasi.

Erosi demokrasi terjadi dalam situasi dan konteks yang berbeda. Negara-negara demokrasi baru seringkali lemah dan rentan. Negara-negara demokrasi yang lebih tua berjuang menjamin pembangunan ekonomi dan sosial yang adil dan berkelanjutan. Proporsi negara demokrasi berkualitas tinggi menurun dan banyak dari negara itu berhadapan dengan kaum populis.

Pada saat yang sama, transisi menuju demokrasi terjadi pada rezim politik yang tampaknya sangat tidak demokratis and aspirasi demokrasi rakyat terus diekspresikan dan dipertahankan di seluruh dunia. Meskipun ada tantangan, demokrasi telah terbukti tangguh. Negara-negara demokrasi juga sudah menunjukkan, dengan beberapa pengecualian, mampu memfasilitasi kondisi yang lebih baik bagi pembangunan berkelanjutan

Ringkasan publikasi International IDEA *Global State of Democracy 2019: Mengatasi Persoalan, Memulihkan Janji* ini menguraikan temuan-temuan utama global dan regional dari laporan ini. Laporan *Global State of Democracy* (GSoD) 2019 menyediakan pemeriksaan kesehatan demokrasi, mengidentifikasi tren demokrasi yang memberi harapan, serta tantangan utama terhadap demokrasi. Hal tersebut mengacu pada data indeks GSoD dan pelajaran yang diperoleh dari bantuan teknis lapangan International IDEA untuk memahami lanskap demokrasi mutakhir. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan strategi, program, dan intervensi kebijakan guna mendukung demokrasi.

International IDEA
Strömsborg
SE-103 34 Stockholm Swedia

Tel: +46 8 698 37 00
info@idea.int www.idea.int

Perludem
Jakarta, Indonesia

Tel. 8300004
admin@perludem.org
www.perludem.org

ISBN: 978-91-7671-302-0 (cetak)
ISBN: 978-91-7671-303-7 (PDF)